

**ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM,  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, JUMLAH PENDUDUK, DAN  
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP KEMISKINAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH  
PADA TAHUN 2019 - 2023**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh :

Nama : Yusuf Fadhly Abdillah

Nomor Mahasiswa : 20313239

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2025**

**PENGESAHAN**  
**ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM,**  
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, JUMLAH PENDUDUK, DAN**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP KEMISKINAN**  
**DI PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PADA TAHUN 2019 - 2023**

Nama : Yusuf Fadhly Abdillah  
Nomor Mahasiswa : 20313239  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing,



Suharto, SE., M.Si.

## **PENGESAHAN UJIAN**

Telah dipertahankan/diujikan dan disahkan untuk memenuhi syarat guna  
memperoleh gelar  
Sarjana jenjang S1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Nama : Yusuf Fadhly Abdillah  
Nomor Mahasiswa : 20313239  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta,  
Disahkan Oleh,

Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.  
Penguji : Dra. Ari Rudatin.M.Si.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E.,M.,Si., Ph.D., CfrA, CertIPSAS.



FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja  
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok  
Sleman, Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546, 883087, 885376;  
F. (0274) 882589  
E. feet@uii.ac.id  
W. fecon.uii.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN**

No.: 2141/Ka.Div/10/Div.PP/VII/2025

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Yusuf Fadhly Abdillah**  
Nomor Mahasiswa : **20313239**  
Dosen Pembimbing : **Suharto, S.E., M.Si.**  
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**  
Judul Karya Ilmiah : **Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 - 2023**  
Nomor Hp : **081312451668**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **1% (satu persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 18 Juli 2025

Kepada Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



Suwardi, S.IP., M.IP.

#### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan dan berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2025

Penulis,



FAJOCAMX425453905  
Yusuf Fadhly Abdillah



FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja  
Universitas Islam Indonesia  
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546, 885376  
F. (0274) 882589  
E. fbe@uii.ac.id  
W. fbe.uii.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

Nomor: 152/Ka.ProdiEp/10/Prodi.Ep/UTA/IX/2024

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Pada Semester Genap 2024/2025, hari Senin, tanggal 04 Agustus 2025, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : YUSUF FADHLY ABDILLAH  
NIM : 20313239  
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019-2023  
Dosen Pembimbing : Suharto, SE., M.Si.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

**Lulus**

Nilai : A  
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

**Tim Penguji:**

Ketua Tim : Suharto, SE., M.Si.  
Anggota Tim : Dra. Ari Rudatin, M.Si.

Yogyakarta, 04 Agustus 2025

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan,



Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.  
NIK. 963130101

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019-2023

Disusun oleh : YUSUF FADHLY ABDILLAH

Nomor Mahasiswa : 20313239

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Senin, 04 Agustus 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

Penguji : Dra. Ari Rudatin, M.Si.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

## PERSEMBAHAN

Bismillāhirrah̄mānirrah̄īm

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subh̄ānahu wa Ta'ālā atas segala limpahan rahmat, karunia, kesehatan, serta kekuatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul:

**"Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019 - 2023"** dengan baik dan penuh perjuangan.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan hormat kepada Kedua orang tua tercinta Abi dan Umi, terima kasih atas doa, cinta kasih, dan dukungan tiada henti yang selalu menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah hidup penulis. Skripsi ini adalah buah dari segala pengorbanan dan kasih sayang kalian. Semoga kelak dapat menjadi amal jariyah yang mengalir pahalanya untuk Ayah dan Ibu. Tak lupa juga penulis ingin berterimakasih juga kepada kakak dan adik penulis, terimakasih atas dukungan baik secara *verbal* maupun *non-verbal*, Lalu kepada Teman-teman seperjuangan dan sahabat kontrakan, terima kasih untuk semangat, canda tawa, diskusi malam, hingga kopi-kopi pengantar lembur yang menjadi warna dalam proses panjang ini. Kebersamaan kita akan selalu menjadi kenangan terbaik dalam perjalanan ini. Dan tak lupa saya ingin berterimakasih kepada sosok yang paling penting, yaitu diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meski lelah dan jatuh berkali-kali. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa saya mampu melampaui batas yang dulu saya kira tidak mungkin. Lalu terakhir kepada segenap pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu. Akhir kata, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir. Aamiin Yā Rabbal 'Ālamīn.

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Penulis

## KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta'ālā atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

"Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019 - 2023"

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Suharto, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Abi dan Umi, terimakasih atas cinta, doa, dan dukungan yang tiada henti, baik secara moral maupun material.
3. Diri saya sendiri, yang telah berjuang tanpa henti, bertahan di tengah banyaknya amanah yang bersandar, dan terus melangkah meski dalam keadaan lelah. Terima kasih telah tidak menyerah dan tetap percaya bahwa semua ini layak diperjuangkan
4. Kakak dan adik penulis, atas segala bentuk dukungan *verbal* maupun *nonverbal* yang selalu menjadi sumber kekuatan.
5. Sahabat kontrakan, Nazmi, Irfan, Hisyam atas segala semangat, bantuan, serta kebersamaan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

6. Teman-teman mentoring serta para murabbi yang terus memberikan dukungan baik dalam bentuk motivasi, konsumsi, ilmu secara langsung maupun tidak langsung, teladan yang baik, serta menjadi sahabat hingga di surga-Nya kelak insyaAllah
7. Teman-teman kontrakan “Maju Jaya” (Dean, Rohit, Adib, Anam, Iwang, Nopeng, Desta, Aldera, dan Yauri) yang telah menghibur, memberikan arahan, dukungan baik dalam bentuk material maupun non material, serta telah menjadi teman yang baik dalam membantu penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen, staf, teman-teman se-jurusan dan se-angkatan, serta pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya terkait isu kemiskinan dan pembangunan ekonomi daerah.

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| SKRIPSI.....                                                              | i   |
| PENGESAHAN.....                                                           | ii  |
| PERSEMBAHAN.....                                                          | vii |
| KATA PENGANTAR.....                                                       | ix  |
| DAFTAR ISI .....                                                          | xi  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                     | xv  |
| ABSTRAK .....                                                             | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                   | 1   |
| 1.1    Latar Belakang.....                                                | 1   |
| 1.2    Rumusan Masalah.....                                               | 6   |
| 1.3    Tujuan Penelitian.....                                             | 6   |
| 1.4    Manfaat Penelitian .....                                           | 7   |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....                            | 9   |
| 2.1    Kajian Pustaka.....                                                | 9   |
| 2.2    Landasan Teori .....                                               | 12  |
| 2.3    Definisi Kemiskinan .....                                          | 19  |
| 2.4    Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.....                             | 21  |
| 2.5    Hubungan Antar Variabel .....                                      | 22  |
| 2.5.1    Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Dengan Kemiskinan     | 22  |
| 2.5.2    Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Kemiskinan .... | 23  |
| 2.5.3    Hubungan Jumlah Penduduk Dengan Kemiskinan .....                 | 23  |
| 2.5.4    Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dengan Kemiskinan | 24  |
| 2.6    Kerangka Berpikir .....                                            | 25  |
| 2.7    Hipotesis Penelitian .....                                         | 25  |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                           | 26  |
| 3.1    Jenis dan Pengumpulan Data.....                                    | 26  |
| 3.1    Definisi Operasional Variabel .....                                | 27  |
| 3.1.1    Variabel Dependen (Y) : Kemiskinan .....                         | 27  |
| 3.1.2    Variabel Independen X1: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).....   | 27  |
| 3.1.3    Variabel Independen X2: Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....    | 28  |

|                                     |                                                                     |    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.4                               | Variabel Independen X3: Jumlah Penduduk .....                       | 28 |
| 3.1.5                               | Variabel Independen X4: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ..... | 29 |
| 3.2                                 | Metode Analisis.....                                                | 29 |
| 3.3                                 | Tahapan Analisis .....                                              | 31 |
| 3.3.1                               | Analisis Statistik Deskriptif .....                                 | 31 |
| 3.3.2                               | Uji Pemilihan Model .....                                           | 31 |
| 3.3.3                               | Estimasi Regresi Data Panel .....                                   | 32 |
| 3.3.4                               | Uji Statistik.....                                                  | 32 |
| 3.3.5                               | Cross Section Effect.....                                           | 32 |
| BAB IV PEMBAHASAN .....             |                                                                     | 34 |
| 4.1                                 | Analisis Data .....                                                 | 34 |
| 4.2                                 | Pemilihan Model Regresi .....                                       | 35 |
| 4.2.1                               | Uji Chow .....                                                      | 36 |
| 4.2.2                               | Uji Hausman .....                                                   | 37 |
| 4.2.3                               | Uji Regresi Data Panel .....                                        | 39 |
| 4.3                                 | Uji Hipotesis.....                                                  | 39 |
| 4.4                                 | Uji Statistik.....                                                  | 40 |
| 4.4.1                               | Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....                              | 40 |
| 4.4.2                               | Uji Parsial (Uji t).....                                            | 41 |
| 4.5                                 | Koefisien Determinasi .....                                         | 42 |
| 4.6                                 | Interpretasi Hasil.....                                             | 43 |
| 4.7                                 | Hasil dan Pembahasan .....                                          | 44 |
| 4.8                                 | Cross Section Effect.....                                           | 47 |
| BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI..... |                                                                     | 49 |
| 5.1                                 | Kesimpulan.....                                                     | 49 |
| 5.2                                 | Implikasi Penelitian .....                                          | 49 |
| 5.2.1                               | Implikasi Teoritis .....                                            | 49 |
| 5.2.2                               | Implikasi Praktis .....                                             | 50 |
| 5.3                                 | Keterbatasan penelitian .....                                       | 50 |
| 5.4                                 | Saran .....                                                         | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                |                                                                     | 52 |
| LAMPIRAN .....                      |                                                                     | 55 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (2019-2023)..... | 2  |
| Gambar 2.1 Kurva Kuznets .....                                         | 12 |
| Gambar 2.2 Dimensi Kemiskinan (Spicker & Chambers).....                | 17 |
| Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....                                      | 25 |

## DAFTAR TABEL

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....            | 11 |
| Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskripsi Data .....   | 34 |
| Tabel 4.2 Hasil Uji Chow .....                  | 37 |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman .....               | 38 |
| Tabel 4.4 Hasil Regresi Model Fixed Effect..... | 39 |
| Tabel 4.5 Hasil Cross Section Effect.....       | 47 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Data Penelitian.....                  | 55 |
| Lampiran 2. Analisis Statistik Deskriptif.....    | 60 |
| Lampiran 3. Hasil Regresi Model Fixed Effect..... | 61 |
| Lampiran 4. Hasil Uji Chow .....                  | 61 |
| Lampiran 5. Hasil Uji Hausman.....                | 61 |
| Lampiran 6. Hasil Cross Section Effect.....       | 62 |

## ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan daerah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan indikator sosial, angka kemiskinan di wilayah ini menunjukkan fluktuasi selama periode 2019–2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel. Model analisis regresi data panel yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM dan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan UMK berpengaruh positif signifikan. Sementara itu, jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas manusia dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dalam strategi pengentasan kemiskinan. Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoretis dalam literatur ekonomi regional, maupun secara praktis dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti.

**Kata Kunci:** *Kemiskinan, UMK, IPM, Jumlah Penduduk, PDRB.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

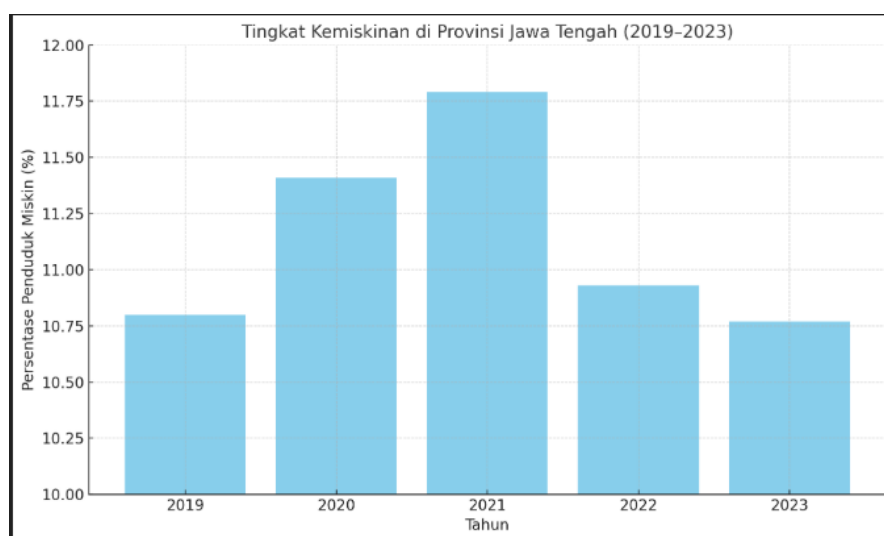
### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang bersifat kronis dan multidimensional, tidak hanya ditentukan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan sering menjadi indikator keterbelakangan sosial-ekonomi yang membutuhkan solusi lintas sektoral. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami tren positif selama dua dekade terakhir, persoalan kemiskinan tetap menjadi hambatan serius bagi pencapaian keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan secara merata, terutama di wilayah dengan beban struktural tinggi seperti Jawa Tengah.

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, baik dari segi kontribusi ekonomi maupun potensi tenaga kerja. Provinsi ini juga dikenal sebagai basis sektor pertanian dan manufaktur, yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Namun demikian, distribusi hasil pembangunan di wilayah ini masih menunjukkan disparitas, terlihat dari ketimpangan antar kabupaten/kota serta fluktuasi angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir. Dalam konteks ini, memahami pola dan determinan kemiskinan di Jawa Tengah menjadi langkah awal yang sangat penting untuk merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis bukti.

Pemilihan Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat, sehingga dinamika sosial-ekonomi di wilayah ini memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian pembangunan nasional. Kedua, meskipun memiliki basis ekonomi yang kuat di sektor pertanian dan manufaktur, angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Jawa Tengah juga memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi antar kabupaten/kota, baik dari sisi struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, maupun kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini menjadikan Jawa Tengah sebagai representasi yang menarik untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kemiskinan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi perumusan kebijakan di Jawa Tengah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi dalam memahami persoalan kemiskinan di provinsi lain dengan karakteristik serupa.



Sumber : BPS Jawa Tengah (2023)

**Gambar 1.1** Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (2019-2023)

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama periode 2019–2023. Pada tahun 2019, angka kemiskinan tercatat sebesar 10,80%, meningkat tajam menjadi 11,41% pada 2020 dan mencapai puncaknya di angka 11,79% pada 2021, diduga kuat sebagai dampak langsung pandemi COVID-19 terhadap ekonomi rumah tangga dan pasar tenaga kerja. Namun, pada 2022 angka tersebut mulai menurun menjadi 10,93%, dan kembali turun menjadi 10,77% pada 2023 (BPS Jawa Tengah, 2024). Penurunan ini mencerminkan upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, meskipun belum cukup signifikan untuk menjangkau kelompok rentan secara menyeluruh (Sulistiani, 2023).

Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di banyak daerah di Jawa Tengah belum

sepenuhnya berbanding lurus dengan pengurangan kemiskinan. Sejumlah studi menemukan bahwa di beberapa kabupaten, pertumbuhan PDRB justru diiringi dengan peningkatan ketimpangan pendapatan dan stagnasi jumlah penduduk miskin (Najmudin, 2023). Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakefektifan dalam proses distribusi hasil pembangunan, di mana sebagian besar pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas.

Selain PDRB, faktor-faktor sosial ekonomi lainnya seperti Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk juga memiliki kontribusi yang besar terhadap dinamika kemiskinan. Upah minimum, yang seharusnya menjadi jaring pengaman pekerja formal, kerap kali menjadi sumber perdebatan kebijakan karena dampaknya yang tidak seragam antar sektor dan daerah. Dalam konteks ini, penelitian oleh Aziz dan Husenudin (2024) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa UMK dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, mengindikasikan bahwa perbaikan kualitas manusia dan perlindungan upah dapat memperkuat daya beli masyarakat miskin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup juga terbukti memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi IPM suatu wilayah, semakin besar pula peluang masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan. Studi oleh Manihuruk dan Suharianto (2024) menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara konsisten berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai strategi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan.

Namun demikian, tidak semua variabel memiliki pengaruh yang konsisten terhadap kemiskinan. UMK, misalnya, memiliki efek yang ambivalen. Di satu sisi, kenaikan UMK dapat meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi di sisi lain dapat menurunkan kapasitas sektor informal untuk menyerap tenaga kerja. Alvin dan Hukom (2023) dalam studinya di Kalimantan Tengah menemukan bahwa kenaikan UMK justru berpotensi meningkatkan pengangguran di sektor informal, sehingga tidak secara otomatis menurunkan angka kemiskinan. Konteks sosial-ekonomi Jawa Tengah yang kompleks dapat menunjukkan pola yang serupa.

Faktor demografis seperti jumlah penduduk juga menjadi variabel penting yang

sering kali diabaikan dalam analisis kebijakan kemiskinan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 36 juta jiwa, Jawa Tengah menghadapi tantangan besar dalam penyediaan lapangan kerja dan layanan dasar. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup dapat menyebabkan tekanan terhadap infrastruktur dan anggaran daerah. Menurut teori Malthus dan didukung oleh Todaro & Smith (2011), pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menekan kapasitas ekonomi lokal, memperparah kemiskinan, dan menciptakan beban sosial baru.

Studi-studi terdahulu sebagian besar berfokus pada pengaruh satu atau dua variabel ekonomi terhadap kemiskinan, seperti pengaruh inflasi, pengeluaran pemerintah, atau tingkat pengangguran. Pendekatan ini dinilai kurang komprehensif karena mengabaikan interaksi antar faktor sosial, ekonomi, dan demografis. Hal ini menciptakan gap dalam literatur akademik, terutama dalam menjelaskan kompleksitas kemiskinan di wilayah dengan heterogenitas tinggi seperti Jawa Tengah. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif untuk memahami penyebab dan dinamika kemiskinan secara simultan.

Salah satu faktor yang sering diteliti berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Misalnya, penelitian oleh Pratama dan Ratih (2022) di Provinsi Lampung menemukan bahwa PDRB dan IPM secara simultan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan, artinya peningkatan PDRB dan IPM cenderung menurunkan kemiskinan. Pilihan variabel ini diperkuat oleh studi Anggoro dan Kriswibowo (2022) di Jawa Timur yang menunjukkan bahwa variabel PDRB, tingkat pengangguran, dan IPM secara signifikan mempengaruhi kemiskinan di wilayah tersebut. Dengan demikian, penggunaan PDRB dan IPM sebagai variabel dalam penelitian ini mempunyai dasar empiris yang kuat dan relevan dalam konteks Indonesia. Namun, hingga kini belum banyak kajian yang menggunakan pendekatan kuantitatif panel data untuk menguji pengaruh simultan UMK, IPM, jumlah penduduk, dan PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa kemiskinan memiliki dampak langsung terhadap ketimpangan sosial, tingkat kriminalitas, dan stabilitas politik lokal. Jawa Tengah sebagai provinsi padat penduduk dan basis ekonomi rakyat harus memiliki kebijakan pengentasan kemiskinan yang terukur dan tepat sasaran.

Tanpa pemahaman akademik yang kuat berbasis data panel, kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat reaktif dan kurang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi dinamika pasca-pandemi.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel, memanfaatkan data dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2019–2023. Model ini memungkinkan analisis lebih kokoh karena menggabungkan dimensi waktu dan ruang, sehingga mampu menangkap variasi antar daerah dan tahun secara lebih akurat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan empiris mengenai sejauh mana masing-masing variabel mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Secara teoretis, penelitian ini akan memperkuat kerangka ekonomi pembangunan yang menggabungkan aspek sosial dan regional. Dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti IPM dan jumlah penduduk, penelitian ini akan memberikan dimensi baru dalam analisis kemiskinan yang sebelumnya terlalu makro dan kurang kontekstual. Selain itu, pendekatan regional akan memungkinkan identifikasi kebijakan spesifik yang relevan dengan karakteristik lokal Jawa Tengah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi. Pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan UMK yang seimbang, memperkuat pembangunan manusia, dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun kebijakan fiskal daerah.

Keunikan lain dari penelitian ini adalah fokus pada periode 2019–2023, yang mencakup masa pra-pandemi, krisis pandemi, dan periode pemulihan ekonomi. Hal ini memungkinkan penelusuran efek jangka pendek dan menengah dari gangguan besar seperti COVID-19 terhadap variabel ekonomi dan sosial. Dalam konteks inilah pendekatan kuantitatif dengan data panel menjadi sangat relevan karena mampu mengisolasi efek waktu dan wilayah secara simultan.

Akhirnya, kontribusi penelitian ini tidak hanya pada pengembangan literatur akademik, tetapi juga pada penyediaan informasi yang kredibel bagi pembuat kebijakan daerah. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

determinan kemiskinan, strategi pengentasan yang diterapkan dapat bersifat inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Maka dari itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh UMK, IPM, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Isu utama dalam penelitian ini adalah masih tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah meskipun terdapat peningkatan pada indikator-indikator makroekonomi dan sosial seperti UMK, IPM, jumlah penduduk, dan PDRB. Fluktuasi angka kemiskinan selama periode 2019–2023 mengindikasikan bahwa belum terdapat pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh simultan dari keempat variabel tersebut terhadap kemiskinan. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengkaji pengaruh masing-masing variabel secara terpisah dan jarang dilakukan dalam konteks regional pasca-pandemi. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan spesifik berikut diajukan untuk memandu arah penelitian:

- a) Bagaimana pengaruh UMK terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2023?
- b) Bagaimana pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2023?
- c) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2023?
- d) Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan secara sistematis, dengan pendekatan kuantitatif berbasis data panel kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir. Tujuan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis bukti:

- a) Menganalisis pengaruh UMK terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023
- b) Menganalisis pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023
- c) Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023
- d) Menganalisis pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1 Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan literatur dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan determinan kemiskinan regional. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana interaksi antara variabel ekonomi (UMK dan PDRB), sosial (IPM), dan demografis (jumlah penduduk) memengaruhi dinamika kemiskinan secara simultan. Dengan menggunakan pendekatan regresi data panel, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam studi terdahulu yang cenderung hanya menggunakan pendekatan linier sederhana atau terbatas pada satu dimensi variabel.

Penelitian ini juga memperkaya penerapan teori efek tetesan ke bawah (*trickle-down effect*), teori modal manusia (*human capital theory*), dan model tekanan demografis (*demographic pressure model*) dalam konteks provinsi berkembang seperti Jawa Tengah, yang belum banyak dianalisis secara integratif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi studi-studi lanjutan mengenai kemiskinan yang lebih responsif terhadap konteks regional dan dinamika pascapandemi. Dengan demikian, kontribusinya tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga analitis dan teoretis terhadap arah pengembangan kebijakan sosial ekonomi berbasis pendekatan multidimensi.

### **2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi pengambil kebijakan, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berbasis data. Hasil analisis dalam penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) agar lebih adaptif terhadap kondisi riil tenaga kerja serta tidak menciptakan kontraproduktivitas bagi sektor informal. Dengan mengetahui dampak UMK terhadap kemiskinan, pemerintah dapat menyeimbangkan antara aspek perlindungan pekerja dan daya saing ekonomi daerah.

Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan masukan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan manusia, khususnya melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal ke sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Selain itu, analisis dampak jumlah penduduk terhadap kemiskinan dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan kependudukan, perencanaan infrastruktur sosial, serta program ketahanan pangan di daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi.

Bagi para praktisi pembangunan daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga perencana pembangunan, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam merancang program intervensi kemiskinan yang berbasis spasial dan temporal. Dengan mengidentifikasi wilayah dan waktu yang paling rentan terhadap peningkatan kemiskinan, intervensi dapat dilakukan secara lebih terfokus, efisien, dan berdampak jangka panjang. Terakhir, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar integrasi indikator kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), agar upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi target statistik, tetapi juga tujuan pembangunan yang konkret dan terukur.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kemiskinan merupakan salah satu indikator utama ketimpangan pembangunan yang mencerminkan ketidakseimbangan distribusi sumber daya dan akses ekonomi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga oleh faktor sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kebijakan pengupahan (UMK), dan pertumbuhan penduduk (Sulistiani, 2023). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkorelasi negatif dengan kemiskinan karena kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi mendorong daya saing ekonomi rumah tangga (Manihuruk & Suhariato, 2024; Najmudin, 2023). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui PDRB berpotensi menurunkan kemiskinan, namun efektivitasnya sangat tergantung pada pemerataan distribusi pendapatan antar wilayah (Aziz & Husenudin, 2024).

Beberapa studi menekankan pentingnya peran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam mengurangi kemiskinan, namun temuan mengenai pengaruhnya masih inkonsisten. Alvin dan Hukom (2023), dalam studi mereka di Kalimantan Tengah, menyatakan bahwa UMK tidak signifikan memengaruhi kemiskinan, sementara IPM dan PDRB memiliki dampak yang signifikan. Hasil serupa diperoleh oleh Manihuruk dan Suhariato (2024) yang menemukan bahwa UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia secara nasional. Sebaliknya, PDRB dan IPM menunjukkan dampak yang lebih kuat dalam menurunkan angka kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun upah minimum ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam konteks regional.

Dalam konteks Jawa Tengah, studi empiris masih relatif terbatas. Sulistiani (2023) melakukan analisis korelasi antara IPM dan kemiskinan di Jawa Tengah

untuk periode 2016–2021 dan menemukan adanya hubungan negatif, namun penelitian tersebut hanya bersifat deskriptif dan tidak menyertakan variabel ekonomi lainnya seperti UMK atau PDRB secara simultan. Kajian oleh Najmudin (2023) juga berfokus pada IPM sebagai satu-satunya variabel penentu, dengan pendekatan yang lebih bersifat deskriptif kualitatif. Dengan demikian, belum ada kajian kuantitatif komprehensif yang menggunakan pendekatan regresi data panel untuk menganalisis pengaruh simultan dari variabel UMK, IPM, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Gap dalam literatur dapat diidentifikasi dalam beberapa hal. Pertama, penelitian sebelumnya biasanya hanya membahas satu atau dua variabel saja, jadi belum bisa melihat hubungan antar variabel secara menyeluruh. Kedua, sebagian besar studi sebelumnya menggunakan data *cross-section* atau *time series* saja, padahal data panel yang menggabungkan dimensi waktu dan lokasi dapat memberikan hasil yang lebih kokoh dan akurat. Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian Pratama dan Ratih (2022) yang menggunakan data lintas provinsi di Indonesia serta Anggoro dan Kriswibowo (2022) di Jawa Timur, di mana metode panel data terbukti mampu menangkap dinamika kemiskinan lebih akurat dibandingkan pendekatan *cross-section* atau *time series*. Ketiga, belum ada penelitian yang secara spesifik memfokuskan pada dampak pandemi *COVID-19* dalam periode 2019–2023 terhadap kemiskinan dan dinamika determinannya di Jawa Tengah, padahal krisis tersebut berdampak signifikan terhadap sektor tenaga kerja, pendapatan, dan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan keempat variabel utama (UMK, IPM, jumlah penduduk, dan PDRB) dalam satu model analisis kuantitatif berbasis data panel, mencakup 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk periode 2019–2023. Penelitian ini akan menggunakan metode estimasi regresi data panel untuk mengevaluasi signifikansi dan arah hubungan antara variabel bebas dan tingkat kemiskinan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kontribusi teoretis dapat diberikan dalam pengembangan literatur mengenai

determinan kemiskinan regional, sementara secara praktis dapat memberikan masukan berbasis bukti bagi penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif di Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa sejumlah penelitian terdahulu telah banyak membahas keterkaitan antara faktor-faktor ekonomi dan sosial dengan tingkat kemiskinan. Namun, temuan dari berbagai penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang beragam, baik dari segi variabel yang digunakan maupun metode analisis yang dipakai. Untuk memperjelas posisi penelitian ini dan mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada, berikut disajikan rangkuman penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian dalam bentuk tabel.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

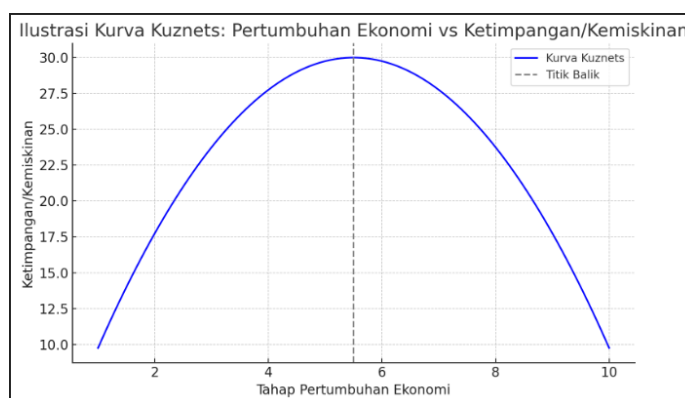
| No | Nama Penulis (Tahun)         | Variabel dan Metode                                                | Kesimpulan/Hasil                                                                                                      |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Anggoro & Kriswibowo (2022)  | Variabel: PDRB, Pengangguran, IPM; Metode: Regresi data panel      | PDRB dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan                                                       |
| 2  | Pratama & Ratih (2022)       | Variabel: PDRB, IPM, Upah Minimum; Metode: Regresi linier berganda | PDRB dan IPM berpengaruh negatif signifikan, sedangkan upah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. |
| 3  | Alvin & Hukom (2023)         | Variabel: PDRB, IPM, UMK; Metode: Regresi OLS                      | PDRB dan IPM berpengaruh signifikan; UMK tidak signifikan.                                                            |
| 4  | Sulistiani & Najmudin (2023) | Variabel: IPM; Metode: Analisis deskriptif-korelasi                | IPM berkorelasi negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.                                                           |
| 5  | Aziz & Husenudin (2024)      | Variabel: UMK, IPM; Metode: Regresi data panel (FEM)               | IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan; UMK tidak signifikan.                                         |
| 6  | Manihuruk & Suhariato (2024) | Variabel: IPM, TPT, UMR; Metode: Regresi data panel                | IPM signifikan negatif terhadap kemiskinan; UMR tidak signifikan.                                                     |

## 2.2 Landasan Teori

Penelitian ini berakar dari sejumlah teori besar dalam ilmu ekonomi dan pembangunan manusia yang memberikan dasar konseptual terhadap hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas manusia, struktur upah, demografi, dan kemiskinan.

### 1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan fondasi utama dari proses pembangunan jangka panjang yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam ekonomi regional, keberhasilan pertumbuhan biasanya tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi indikator penting kapasitas produksi suatu wilayah. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan penurunan kemiskinan secara otomatis. Hubungan keduanya bersifat kompleks, tergantung pada distribusi hasil pembangunan dan dinamika struktur ekonomi lokal



**Gambar 2.1** Kurva Kuznets

Menurut Simon Kuznets, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sosial berbentuk U-terbalik, yang dikenal sebagai Kurva Kuznets. Pada fase awal pembangunan, pertumbuhan justru menyebabkan peningkatan ketimpangan karena manfaatnya hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu, terutama pelaku sektor modern atau kapitalis. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan penerapan kebijakan distribusi yang lebih merata, pertumbuhan tersebut akan menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dan secara bertahap menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dalam jangka panjang, peningkatan PDRB dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan apabila pertumbuhan ekonomi tersebut bersifat inklusif dan terdistribusi secara adil.

Ilustrasi kurva Kuznets di atas menggambarkan bahwa pada tahap awal (kiri kurva), pertumbuhan justru memperlebar ketimpangan, tetapi pada titik balik tertentu, peningkatan ekonomi mulai menurunkan tingkat kemiskinan. Fenomena ini sangat relevan dengan kondisi di Jawa Tengah yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan PDRB yang fluktuatif, namun belum secara konsisten menurunkan angka kemiskinan secara proporsional.

Lebih lanjut, Arthur Lewis memperkenalkan teori dualisme struktural dalam ekonomi negara berkembang, yang menjelaskan bahwa perekonomian terdiri atas dua sektor utama: sektor tradisional (pertanian subsisten) dan sektor modern (industri dan jasa). Lewis berargumen bahwa transisi tenaga kerja dari sektor tradisional berproduktivitas rendah ke sektor modern yang lebih produktif menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Peningkatan PDRB hanya akan efektif dalam menurunkan kemiskinan jika disertai dengan transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja produktif di sektor modern.

Kontribusi dari teori Lewis ini sangat penting untuk menjelaskan dinamika di Jawa Tengah, yang memiliki struktur ekonomi ganda, di satu sisi ditopang oleh sektor agraris tradisional, namun di sisi lain mulai berkembang industri padat karya dan jasa. Jika peningkatan PDRB sebagian besar hanya berasal dari sektor modern tanpa partisipasi sektor tradisional, maka kemiskinan di pedesaan bisa saja tetap tinggi karena tidak terintegrasi dalam proses pertumbuhan tersebut.

Michael Todaro menambahkan perspektif yang lebih manusiawi dalam melihat pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran terselubung, dan peningkatan kualitas hidup. Dalam bukunya *Economic Development*, Todaro mengkritik pandangan konvensional yang mengandalkan pertumbuhan PDB sebagai indikator tunggal pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek distribusi. Oleh karena itu, pendekatan Todaro menjadi sangat relevan dalam penelitian ini yang juga melibatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk sebagai variabel utama yang mencerminkan dimensi kualitas dan tekanan sosial dalam konteks pertumbuhan.

Dengan kata lain, teori Todaro mendorong pemahaman bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus tidak hanya mengejar nilai PDRB yang tinggi, tetapi juga

mengutamakan keberlanjutan sosial dan penyertaan kelompok rentan. IPM sebagai indikator kualitas manusia, serta jumlah penduduk sebagai tekanan terhadap sumber daya dan layanan publik, menjadi variabel penting dalam menilai efektivitas pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan.

Integrasi dari ketiga teori ini, yaitu Kuznets, Lewis, dan Todaro, memberikan landasan konseptual yang kuat bagi penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB hanya akan menurunkan kemiskinan jika disertai dengan peningkatan kualitas manusia (IPM), pengelolaan jumlah penduduk, dan sistem distribusi upah yang adil. Oleh karena itu, hubungan antara PDRB dan kemiskinan tidak dapat dilihat secara linier, melainkan harus dianalisis dalam kerangka teoritis yang mempertimbangkan distribusi, transisi sektor, dan kapabilitas manusia.

## **2. Teori Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan persoalan sosial-ekonomi yang kompleks, tidak hanya ditentukan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya penting yang dibutuhkan untuk mencapai kehidupan yang layak. Dalam perkembangan teori-teori sosial kontemporer, pendekatan terhadap kemiskinan tidak lagi terbatas pada ukuran finansial semata, melainkan telah berevolusi menjadi pendekatan multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan kultural. Oleh karena itu, untuk memahami dan menganalisis kemiskinan secara utuh, diperlukan pendekatan konseptual yang mencerminkan kenyataan sosial yang lebih luas.

Salah satu pendekatan teoritis yang berpengaruh dalam memahami kemiskinan berasal dari Paul Spicker. Dalam kerangka berpikirnya, Spicker membagi kemiskinan ke dalam dua kategori besar, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, pakaian, dan sanitasi. Dalam konteks ini, individu atau rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut mengalami deprivasi serius yang berdampak langsung terhadap kesehatan fisik dan kelangsungan hidupnya.

Berbeda dengan itu, kemiskinan relatif mencerminkan ketimpangan dalam standar hidup antara individu dengan mayoritas masyarakat di sekitarnya. Individu yang miskin secara relatif mungkin tidak kelaparan atau kehilangan tempat tinggal, tetapi tidak memiliki akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan layak, sarana transportasi, atau teknologi informasi yang kini menjadi standar kebutuhan dasar modern. Kemiskinan relatif ini sering kali tersembunyi dalam data statistik karena tidak terwakili dalam indikator ekonomi konvensional seperti PDB atau garis kemiskinan berbasis konsumsi. Padahal, dampaknya terhadap ketimpangan sosial dan eksklusi sangat signifikan.

Dalam praktik pengukuran di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) umumnya menggunakan pendekatan kemiskinan absolut, dengan mengacu pada garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya mencerminkan dimensi-dimensi lain dari kemiskinan yang tidak berwujud

secara kasat mata, seperti keterbatasan akses terhadap partisipasi sosial, informasi, dan pengambilan keputusan publik.

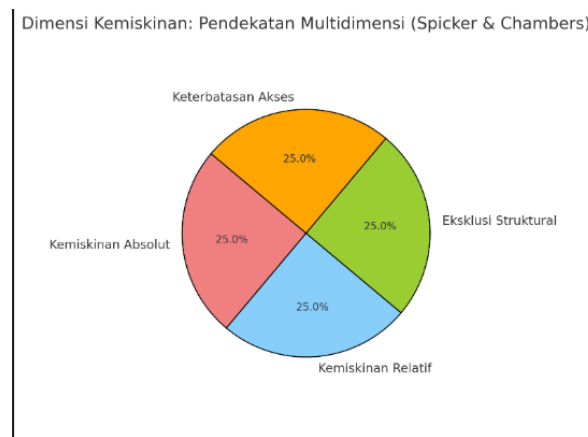
Konsep kemiskinan semakin diperluas oleh pemikiran Robert Chambers, yang melihat kemiskinan sebagai bentuk dari eksklusi sosial yang struktural. Chambers menggarisbawahi bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kondisi individual, seperti kurangnya pendidikan atau rendahnya keterampilan, tetapi merupakan akibat dari sistem ekonomi dan sosial yang membatasi partisipasi masyarakat miskin. Ia memperkenalkan istilah "*deprivation trap*", yaitu kondisi jebakan multidimensi yang meliputi kekurangan aset, kerentanan, keterasingan sosial, kelemahan kelembagaan, dan ketergantungan terhadap pihak lain.

Menurut Chambers, kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan kekuasaan, dimana kelompok miskin seringkali tidak memiliki suara dalam pengambilan kebijakan atau tidak mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Mereka cenderung terpinggirkan dari arus utama pembangunan karena tidak memiliki daya tawar ekonomi maupun politik. Dalam konteks ini, kemiskinan menjadi produk dari sistem sosial-ekonomi yang tidak adil, bukan semata-mata karena rendahnya produktivitas atau daya saing individu.

Dalam penelitian ini, pemahaman kemiskinan sebagai fenomena struktural dan multidimensi sangat relevan, terutama karena variabel-variabel yang diteliti—yakni UMK, IPM, jumlah penduduk, dan PDRB merupakan faktor-faktor yang berakar pada kebijakan makro dan struktur sosial-ekonomi daerah. UMK menggambarkan kebijakan intervensi pasar tenaga kerja yang bertujuan melindungi kelompok pekerja rentan; IPM mencerminkan kualitas modal manusia sebagai alat keluar dari kemiskinan; jumlah penduduk mewakili tekanan demografis yang dapat memperberat kondisi kemiskinan; sedangkan PDRB menjadi indikator kapasitas ekonomi suatu wilayah dalam menciptakan kesejahteraan.

Lebih dari itu, pendekatan Chambers juga menekankan pentingnya akses terhadap layanan publik sebagai determinan penting kemiskinan. Daerah dengan PDRB tinggi belum tentu memiliki angka kemiskinan rendah apabila distribusi pendapatan dan akses layanan tidak merata. Misalnya, daerah dengan pertumbuhan ekonomi pesat yang hanya terkonsentrasi di sektor industri formal, namun tidak menjangkau masyarakat pedesaan atau pekerja sektor informal, berpotensi

menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru. Oleh karena itu, pemahaman struktural ini membantu menjelaskan mengapa kemiskinan tetap bertahan meskipun indikator makroekonomi meningkat.



**Gambar 2.2** Dimensi Kemiskinan (Spicker & Chambers)

Sebagai penguatan kerangka teoritis, grafik lingkaran yang ditampilkan sebelumnya menggambarkan dimensi-dimensi utama dalam pendekatan Spicker dan Chambers: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, eksklusi struktural, dan keterbatasan akses. Keempat aspek ini saling terkait dan membentuk jaring penyebab yang kompleks. Individu yang mengalami satu bentuk kemiskinan kemungkinan besar juga mengalami bentuk lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus bersifat menyeluruh dan lintas sektor, bukan hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga penciptaan akses dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai penutup, teori kemiskinan yang dikemukakan oleh Spicker dan Chambers memberikan landasan filosofis sekaligus operasional untuk melihat kemiskinan sebagai persoalan yang tidak bisa disederhanakan menjadi urusan ekonomi semata. Dalam konteks penelitian ini, teori-teori tersebut menjadi fondasi dalam merumuskan model kuantitatif yang akan menguji pengaruh variabel ekonomi dan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, pendekatan teoritis ini tidak hanya memperkaya dimensi analisis, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan berdasarkan penelitian ini memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

### **3. Teori Pembangunan Manusia dan IPM**

Pendekatan pembangunan manusia, sebagaimana diperkenalkan oleh Amartya Sen dan diadopsi oleh UNDP, menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perluasan kapabilitas individu. Kapabilitas yang dimaksud meliputi kemampuan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan yang layak, dan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidup. Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator utama yang mengukur kualitas sumber daya manusia melalui tiga dimensi: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Hasil penelitian terdahulu seperti oleh Najmudin (2023) dan Manihuruk & Suhariato (2024) memperlihatkan bahwa IPM memiliki korelasi negatif yang kuat terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi IPM suatu wilayah, maka semakin rendah tingkat kemiskinannya. Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa IPM menjadi instrumen kunci dalam memutus lingkaran kemiskinan karena individu yang sehat, terdidik, dan memiliki standar hidup layak akan memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan dan berpartisipasi aktif dalam perekonomian.

### **4. Teori Upah dan Pasar Tenaga Kerja**

Sistem upah minimum sebagai perlindungan terhadap pekerja telah menjadi alat kebijakan penting dalam pembangunan sosial ekonomi. Menurut David Ricardo, penerapan upah minimum yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap tenaga kerja, khususnya di sektor informal dan usaha mikro kecil, karena biaya produksi meningkat. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan pengangguran dan justru memperburuk kondisi kemiskinan.

Sebaliknya, John Stuart Mill berpendapat bahwa sistem upah minimum yang adil dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, terutama jika dikombinasikan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam konteks penelitian ini, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diharapkan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Jika UMK ditetapkan pada tingkat yang proporsional dengan produktivitas, maka dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan mempercepat penurunan angka kemiskinan. Namun, efeknya juga bergantung pada struktur ekonomi lokal, keberadaan sektor informal, dan kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja.

## **5. Paradigma Lingkaran Kemiskinan**

Ragnar Nurkse dalam konsepnya mengenai *vicious circle of poverty* menjelaskan bahwa kemiskinan cenderung membentuk siklus yang sulit diputus. Rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya tingkat tabungan dan investasi, yang berdampak pada stagnasi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini pada akhirnya memperkuat kemiskinan secara antargenerasi. Paradigma ini menyoroti pentingnya intervensi kebijakan untuk memutus lingkaran tersebut, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan kesempatan kerja.

Dalam konteks penelitian ini, jumlah penduduk diposisikan sebagai variabel yang berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan. Daerah dengan jumlah penduduk besar, apabila tidak diimbangi dengan IPM yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang merata, cenderung mengalami tekanan terhadap layanan dasar, ketersediaan lapangan kerja, dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, jumlah penduduk dalam penelitian ini diasumsikan memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, terutama dalam konteks tekanan struktural terhadap sumber daya terbatas.

### **2.3 Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan secara umum dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan ketika pengeluaran per kapita seseorang berada di bawah Garis Kemiskinan, yang mencakup dua komponen: garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Standar ini bersifat operasional dan digunakan dalam berbagai kajian kebijakan di tingkat nasional dan daerah (Winarno & Widjanarko, 2023).

Konsep kemiskinan absolut merujuk pada ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak, terlepas dari kondisi lingkungan sosial. Kemiskinan absolut bersifat universal, sehingga indikatornya relatif seragam di berbagai negara, yakni berdasarkan kebutuhan kalori, hunian, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan minimum. Dalam konteks Indonesia, pendekatan absolut digunakan oleh BPS, di mana garis kemiskinan dihitung

berdasarkan kebutuhan kalori minimum sebesar 2.100 kkal per kapita per hari, ditambah kebutuhan non-makanan esensial (Delistiawati, 2020).

Sementara itu, kemiskinan relatif mengacu pada ketimpangan sosial ekonomi, di mana seseorang dianggap miskin bukan karena tidak memiliki cukup untuk bertahan hidup, tetapi karena secara signifikan lebih rendah dibanding standar hidup mayoritas masyarakat. Konsep ini lebih menekankan pada distribusi kekayaan dan akses terhadap peluang ekonomi. Dalam kebijakan pembangunan yang inklusif, pendekatan relatif semakin penting karena memperhatikan dimensi keadilan sosial (Nasution et al., 2020).

Dalam masyarakat berkembang, kemiskinan kultural atau psiko-kultural juga menjadi perhatian. Konsep ini menjelaskan kemiskinan sebagai hasil dari pola pikir, budaya, atau nilai-nilai sosial yang menghambat individu untuk keluar dari kemiskinan. Individu miskin dalam konteks ini tidak hanya menghadapi kendala ekonomi tetapi juga faktor internal seperti fatalisme, ketidakpercayaan diri, rendahnya aspirasi, dan ketergantungan pada bantuan sosial (Yulasteriyani et al., 2020). Faktor-faktor ini memperkuat kemiskinan intergenerasional.

Pendekatan teoritis terhadap kemiskinan juga mencakup dimensi multidimensi seperti yang ditunjukkan oleh Nurwati (2008) dalam kajiannya, bahwa kemiskinan tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Dengan kata lain, upaya pengukuran dan penanggulangan kemiskinan tidak cukup dengan indikator pendapatan saja, tetapi perlu memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan, keterlibatan sosial, dan akses terhadap layanan dasar.

Dalam ranah kebijakan, pemahaman mengenai jenis kemiskinan menjadi penting untuk menyusun intervensi yang tepat. Kemiskinan absolut dapat ditangani dengan bantuan langsung dan program jaminan sosial, sedangkan kemiskinan relatif membutuhkan reformasi struktural dan redistribusi kekayaan. Sementara itu, mengatasi kemiskinan kultural memerlukan pendekatan perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat (Sukarno, 2020).

Dalam penelitian ini, kemiskinan didefinisikan berdasarkan pendekatan operasional BPS, yaitu jumlah penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Data diambil dari publikasi resmi BPS Provinsi Jawa Tengah. Definisi ini mendukung pendekatan kuantitatif dan dapat diukur secara numerik menggunakan analisis regresi panel.

Namun demikian, pemahaman terhadap kemiskinan sebagai fenomena sosial-ekonomi struktural tetap penting. Kemiskinan bukan semata hasil dari rendahnya pendapatan, tetapi juga akibat dari ketimpangan pembangunan, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya upah riil. Oleh karena itu, penelitian ini juga mempertimbangkan variabel-variabel determinan seperti UMK, IPM, PDRB, dan jumlah penduduk.

Dengan merujuk pada berbagai pendekatan di atas, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengukuran dan pemahaman kemiskinan secara lebih komprehensif. Definisi BPS yang berbasis absolut digunakan untuk operasionalisasi variabel, namun analisis dan interpretasi hasil tetap mengacu pada dinamika sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini mendukung pengembangan kebijakan berbasis bukti yang lebih holistik dan berkeadilan.

## **2.4 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh beragam faktor struktural dan sosial. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan akses terhadap modal. Modal di sini bukan hanya berarti modal finansial untuk membuka usaha, tetapi juga mencakup akses terhadap kredit, kepemilikan aset, dan keterlibatan dalam jaringan ekonomi. Menurut Nasution (2020), kemiskinan muncul akibat kesenjangan dalam kepemilikan dan penguasaan sumber daya produksi, sehingga banyak rumah tangga tidak memiliki kapasitas produktif untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain keterbatasan modal, akses terhadap pendidikan juga menjadi penentu signifikan dalam menekan angka kemiskinan. Pendidikan yang rendah berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja dan peluang untuk memperoleh pekerjaan layak. Aziz dan Husenudin (2024) menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan memperparah ketimpangan dan memperbesar risiko kemiskinan antargenerasi, karena anak-anak dari keluarga miskin cenderung mengulang siklus kemiskinan yang sama akibat rendahnya modal manusia.

Kesehatan adalah dimensi lain yang penting. Akses terhadap layanan kesehatan menentukan kualitas hidup dan produktivitas individu. Setyadi dan Indriyani (2021) menekankan bahwa masyarakat miskin sering kali tidak memiliki akses memadai

terhadap layanan kesehatan, baik karena biaya maupun keterjangkauan fasilitas. Akibatnya, angka kematian, malnutrisi, dan penyakit menular lebih tinggi di kalangan miskin, yang kemudian memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi.

Salah satu faktor struktural penting dalam studi ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan, kemiskinan tetap bertahan atau bahkan meningkat. Menurut Haya et al. (2022), ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia semakin tajam pasca pandemi, memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak selalu berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan di tingkat rumah tangga. Ketimpangan ini juga memperbesar ketidakadilan dalam akses layanan publik dan kesempatan kerja.

Menurut teori *Trickle-down Effect*, pertumbuhan ekonomi semestinya mengalir ke seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan justru menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok atas. Hal ini ditegaskan oleh Purnomo dan Wijaya (2021) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur, meskipun meningkat, tidak selalu merata secara spasial sehingga akses masyarakat miskin tetap terhambat.

Keterbatasan modal, rendahnya pendidikan, dan kesehatan yang buruk sering kali terjadi secara bersamaan dalam siklus yang dikenal sebagai lingkaran kemiskinan. Hal ini dijelaskan secara komprehensif oleh Nurkse dan diperkuat oleh Mulyani (2020), bahwa kemiskinan bukan sekadar hasil dari kurangnya sumber daya, tetapi juga akibat dari interaksi antar faktor yang saling memperkuat. Individu yang sakit, tidak berpendidikan, dan tidak punya modal akan sangat sulit keluar dari jebakan kemiskinan tanpa intervensi kebijakan yang efektif.

## **2.5 Hubungan Antar Variabel**

### **2.5.1 Hubungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Dengan Kemiskinan**

Secara teori, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, efek ini dapat bersifat ambigu. Dalam jangka pendek, upah yang tinggi bisa mengurangi serapan tenaga kerja di sektor informal, menyebabkan pengangguran. Penelitian oleh Manihuruk & Suhariato (2024) menunjukkan bahwa UMK memiliki hubungan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, namun dengan arah positif, yang berarti bahwa peningkatan UMK

belum tentu menurunkan kemiskinan jika tidak disertai pertumbuhan lapangan kerja yang inklusif.

### **2.5.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Kemiskinan**

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Kemiskinan merepresentasikan kualitas sumber daya manusia melalui indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Secara teoritis, IPM yang tinggi mencerminkan peningkatan kualitas hidup yang seharusnya menurunkan angka kemiskinan. Dalam studi Arifin & Hendriyani (2022), IPM terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, yang berarti bahwa semakin tinggi IPM, maka semakin rendah kemungkinan masyarakat berada dalam kondisi miskin. Ini mendukung pandangan Amartya Sen tentang pentingnya *capability approach* dalam pembangunan manusia.

### **2.5.3 Hubungan Jumlah Penduduk Dengan Kemiskinan**

Dalam teori ekonomi kependudukan, pertumbuhan penduduk yang tinggi memberi tekanan pada sumber daya, infrastruktur, dan lapangan pekerjaan. Dalam teori demografi ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi memberikan tekanan terhadap sumber daya, infrastruktur, dan kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemiskinan jika kapasitas ekonomi tidak diimbangi. Penelitian Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia oleh Rizkina (2025) menemukan bahwa di 34 provinsi, peningkatan jumlah penduduk secara signifikan berhubungan positif dengan tingkat kemiskinan. Selanjutnya, studi Angelia & Anitasari (2025) di Pulau Jawa juga mengonfirmasi temuan tersebut, bahwa jumlah penduduk yang tinggi berkontribusi terhadap peningkatan populasi miskin selama periode 2014-2022. Temuan dari penelitian N. Prawoto (2024), yang menggunakan data panel provinsi, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, variabel jumlah penduduk memiliki efek positif terhadap pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Semua penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanpa pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan kebijakan pendukung, jumlah penduduk yang tinggi dapat memperburuk ketimpangan kemiskinan.

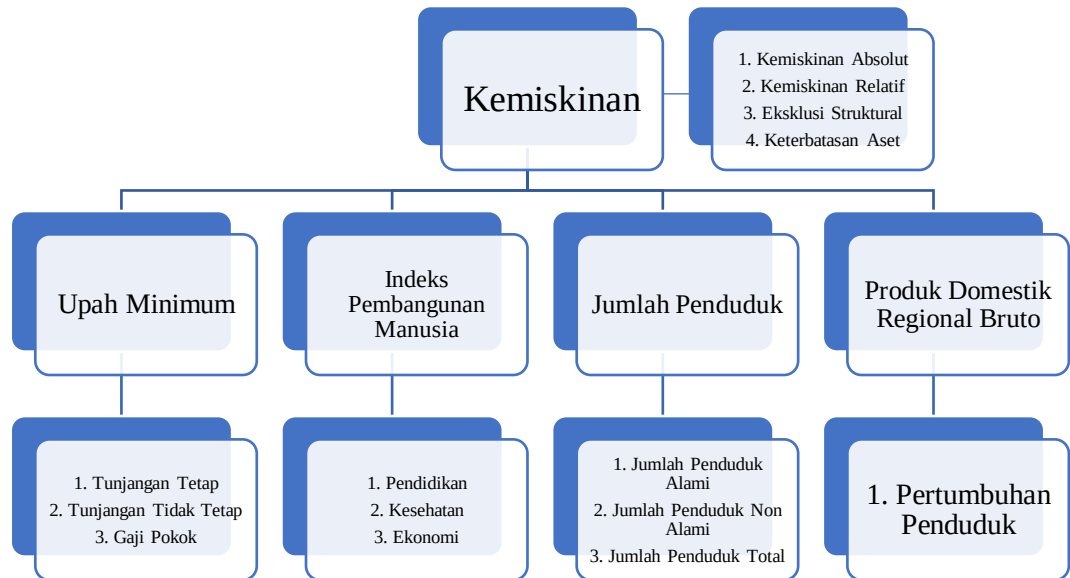
#### **2.5.4 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dengan Kemiskinan**

Secara teori, pertumbuhan PDRB seharusnya menurunkan tingkat kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Namun, Arifin dan Wahid (2020) menyoroti bahwa pertumbuhan PDRB belum tentu inklusif; jika distribusi hasil pembangunan tidak merata, maka kelompok miskin tidak otomatis memperoleh manfaat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu disertai dengan kebijakan pemerataan untuk berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan.

Hubungan antar keempat variabel ini membentuk kerangka model empiris dalam penelitian ini. UMK dan IPM secara langsung berkaitan dengan kesejahteraan individu, sementara jumlah penduduk dan PDRB memengaruhi struktur dan kapasitas ekonomi makro daerah. Hasil penelitian sebelumnya menyarankan bahwa interaksi antar variabel ini tidak linier dan sangat tergantung pada konteks regional serta efektivitas kebijakan yang menyertainya (Purnomo & Utami, 2021).

Secara keseluruhan, pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan statistik antar variabel menggunakan model regresi data panel. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kontribusi masing-masing faktor dalam memengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah secara spesifik. Dengan memahami hubungan antar variabel ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berbasis bukti.

## 2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

## 2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori, kajian pustaka, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023
- H2: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023
- H3: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023
- H4: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pengumpulan Data**

Dalam penelitian “Analisis Pengaruh UMK, IPM, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023”, digunakan data kuantitatif sekunder yang bersifat numerik dan berasal dari publikasi resmi instansi pemerintah, terutama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Data yang dikumpulkan berbentuk data panel, yaitu gabungan data time series (tahun 2019–2023) dan cross section (35 kabupaten/kota di Jawa Tengah), yang sangat sesuai dengan pendekatan regresi panel yang akan digunakan.

Data yang digunakan mencakup beberapa variabel utama yaitu:

- a) Jumlah penduduk miskin (dalam ribu jiwa),
- b) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (rupiah)
- c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (persen)
- d) Jumlah penduduk per kabupaten/kota (jiwa)
- e) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku (juta rupiah).

Jenis data ini bersifat kuantitatif numerik karena seluruh variabel dinyatakan dalam bentuk angka, baik persentase, nilai rupiah, indeks, maupun satuan penduduk. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai untuk mengukur hubungan kausal dan kekuatan pengaruh antar variabel, serta memungkinkan pengujian hipotesis secara statistik dengan alat analisis regresi data panel.

Data sekunder dipilih karena sifatnya yang lebih efisien, terpercaya, dan dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai dari lembaga resmi seperti BPS. Beberapa penelitian juga menggunakan data serupa karena validitas dan reliabilitasnya telah terjamin (Wijaksana, 2022; Arifin & Hendriyani, 2022). Selain itu, data ini telah melalui proses pengumpulan, verifikasi, dan publikasi oleh institusi yang kredibel sehingga layak untuk dianalisis secara ilmiah.

### **3.1 Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan lima variabel utama, yaitu satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan (Y), sedangkan variabel independen terdiri dari Upah (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), Produk Domestik Regional Bruto (X3), dan jumlah penduduk (X4). Setiap variabel dirumuskan secara konseptual dan dioperasionalkan secara kuantitatif berdasarkan teori dan standar pengukuran yang relevan, guna menjamin validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan.

#### **3.1.1 Variabel Dependen (Y) : Kemiskinan**

Secara konseptual, kemiskinan merujuk pada kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Definisi ini mengacu pada pendekatan kemiskinan absolut yang dijelaskan oleh Paul Spicker (2007) dan digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam konteks penelitian ini, kemiskinan dioperasionalkan sebagai jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data diperoleh dari publikasi resmi BPS Jawa Tengah per semester (Maret dan September) dalam periode 2019–2023. Alat ukur yang digunakan adalah data statistik sekunder yang diukur dalam satuan “ribu jiwa”.

#### **3.1.2 Variabel Independen X1: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)**

UMK secara konseptual adalah tingkat upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin penghasilan dasar pekerja di suatu kabupaten/kota. Teori pasar tenaga kerja klasik seperti yang dikemukakan oleh David Ricardo dan John Stuart Mill menyebutkan bahwa upah minimum memengaruhi kesejahteraan tenaga kerja dan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data UMK 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019 - 2023. Data diperoleh dari dokumen resmi peraturan gubernur dan statistik ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio, karena nilai UMK dinyatakan dalam angka absolut (rupiah) dan memiliki nol absolut.

### **3.1.3 Variabel Independen X2: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Secara konseptual, IPM adalah ukuran komposit yang dikembangkan oleh UNDP dan Amartya Sen untuk menggambarkan kualitas hidup manusia dari tiga dimensi utama: kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (lama sekolah dan harapan sekolah), dan standar hidup layak (pengeluaran riil per kapita). Dalam penelitian ini, IPM dioperasionalkan sebagai nilai indeks pembangunan manusia yang dihitung oleh BPS setiap tahun untuk masing-masing kabupaten/kota dengan skala 0–100. Indikator IPM sudah merupakan agregat dari tiga subdimensi, sehingga tidak dilakukan pengukuran ulang oleh peneliti. Data diperoleh dari portal data BPS, dan skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio, karena IPM bersifat kuantitatif, kontinu, dan memiliki nol mutlak secara teoritis.

### **3.1.4 Variabel Independen X3: Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk secara konseptual merujuk pada total populasi yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada periode tertentu. Dalam teori pembangunan dan demografi, jumlah penduduk yang tinggi dapat memengaruhi tingkat kemiskinan melalui tekanan terhadap infrastruktur, pasar tenaga kerja, dan kebutuhan sosial lainnya (Nurkse, 1953). Dalam konteks penelitian ini, jumlah penduduk dioperasionalkan sebagai jumlah total jiwa per kabupaten/kota per tahun berdasarkan data proyeksi penduduk dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Data dihimpun secara sekunder dan dinyatakan dalam satuan jiwa. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio karena datanya bersifat numerik absolut dan memungkinkan perbandingan proporsional.

### 3.1.5 Variabel Independen X4: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang secara konseptual merupakan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah selama satu tahun. Dalam konteks teori pertumbuhan ekonomi (Kuznets dan Lewis), PDRB mencerminkan kapasitas ekonomi daerah dalam menciptakan kesejahteraan dan mendistribusikan hasil pembangunan. Dalam penelitian ini, PDRB dioperasionalkan sebagai nilai PDRB atas dasar harga berlaku (dalam juta rupiah) per kabupaten/kota setiap tahun. Data ini diperoleh dari laporan BPS yang mencakup sektor-sektor ekonomi utama. Pengukuran dilakukan menggunakan skala rasio, karena nilai PDRB bersifat kontinu dan dapat digunakan dalam analisis regresi panel.

## 3.2 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistik inferensial, khususnya regresi data panel untuk menguji pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Teknik ini dipilih karena data yang digunakan bersifat panel, yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross section* selama periode 2019–2023 pada 35 kabupaten/kota. Penggunaan regresi data panel memungkinkan pengujian hubungan kausal secara lebih akurat dengan memperhitungkan dinamika waktu dan perbedaan antar wilayah.

Langkah awal dalam analisis data adalah melakukan statistik deskriptif terhadap seluruh variabel penelitian. Statistik ini mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum dan minimum, serta standar deviasi. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai distribusi, skala, dan penyebaran data yang akan dianalisis. Statistik deskriptif juga bermanfaat untuk melihat apakah ada data yang menyimpang atau tidak wajar sebelum dilakukan analisis lanjutan.

Setelah itu, dilakukan estimasi regresi dengan menggunakan tiga pendekatan dalam regresi data panel, yaitu:

1. *Common Effect Model* (CEM) – model dasar yang mengasumsikan bahwa tidak terdapat perbedaan individual antar entitas (kabupaten/kota) dan waktu.

Model ini menggunakan *Ordinary Least Squares* (OLS) tanpa mempertimbangkan heterogenitas unit data.

2. *Fixed Effect Model* (FEM) – model ini mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik tetap (*fixed*) antar individu (kabupaten/kota) yang tidak dapat diamati namun memengaruhi variabel dependen. FEM digunakan jika karakteristik individual dianggap memengaruhi hubungan antar variabel.
3. *Random Effect Model* (REM) – model yang mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. REM digunakan ketika karakteristik individual tidak bersifat tetap, dan variabilitas antar individu bisa dianggap sebagai bagian dari *error term*.

Untuk menentukan model panel terbaik yang akan digunakan dalam estimasi akhir, dilakukan dua tahap pengujian pemilihan model, yaitu:

- a) Uji Chow: Digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikan ( $p\text{-value} < 0,05$ ), maka FEM lebih tepat digunakan dibandingkan CEM.
- b) Uji Hausman: Digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikan ( $p\text{-value} < 0,05$ ), maka FEM lebih sesuai; sebaliknya, jika tidak signifikan, maka REM lebih tepat digunakan.

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data adalah EViews, yang merupakan software statistik standar untuk analisis data panel dan regresi ekonomi. Program ini menyediakan alat yang andal untuk mengestimasi model secara akurat dan terstruktur.

Untuk memastikan keakuratan dan keterpercayaan hasil analisis, peneliti akan melakukan beberapa langkah validasi, yaitu:

- a) Memastikan kelengkapan dan konsistensi data dari sumber resmi (BPS).
- b) Melakukan uji asumsi klasik pada model terpilih untuk menghindari pelanggaran terhadap asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).
- c) Melakukan pengujian statistik seperti uji-t (signifikansi parsial), uji-F (signifikansi simultan), dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk menilai kekuatan prediktif model.
- d) Menggunakan interpretasi ekonometrika yang konsisten dengan teori dan

literatur sebelumnya agar hasil analisis relevan dan tidak menyesatkan secara substantif.

Dengan teknik analisis ini, diharapkan penelitian mampu menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis secara empiris serta menyajikan temuan yang valid untuk mendukung pengambilan kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

### **3.3 Tahapan Analisis**

Dalam penelitian ini, tahapan analisis data dilakukan secara bertahap dan sistematis guna memperoleh hasil empiris yang valid serta menjawab tujuan dan hipotesis penelitian.

#### **3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis Statistik Deskriptif merupakan penyajian informasi awal mengenai variabel-variabel yang digunakan. Deskripsi ini mencakup jumlah observasi, satuan pengukuran, serta ringkasan statistik yang meliputi nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel. Tahap ini bertujuan untuk memahami karakteristik data panel yang terdiri atas 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama lima tahun (2019–2023). Selain itu, statistik deskriptif juga digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah, seperti adanya data yang menyimpang, perbedaan satuan yang tidak konsisten, atau pola distribusi data yang tidak normal.

#### **3.3.2 Uji Pemilihan Model**

Setelah data dipastikan bersih dan siap dianalisis, tahapan selanjutnya adalah melakukan uji pemilihan model terbaik dalam regresi data panel. Terdapat tiga model utama yang digunakan dalam regresi panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model mana yang paling sesuai, dilakukan dua jenis pengujian: pertama, Uji Chow dilakukan untuk membandingkan CEM dengan FEM. Jika hasil uji menunjukkan bahwa FEM lebih signifikan secara statistik, maka CEM ditolak. Kedua, Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara FEM dan REM. Jika nilai p-value pada uji Hausman kurang dari 0,05,

maka FEM dipilih karena memperhitungkan heterogenitas antar entitas secara tetap (*fixed*), sedangkan jika tidak signifikan, maka REM dianggap lebih efisien.

### 3.3.3 Estimasi Regresi Data Panel

Setelah model terbaik dipilih berdasarkan hasil pengujian tersebut, tahap berikutnya adalah melakukan estimasi model regresi panel. Dalam tahap ini, koefisien regresi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dihitung menggunakan software statistik seperti EViews. Estimasi ini akan menunjukkan arah dan besarnya pengaruh dari variabel-variabel seperti UMK, IPM, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

### 3.3.4 Uji Statistik

Tahapan terakhir dalam proses analisis adalah melakukan pengujian statistik guna menguji signifikansi dan kekuatan model. Tiga uji utama yang digunakan adalah: (1) Uji t, yang bertujuan menguji pengaruh secara parsial atau individual dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai  $p\text{-value} < 0,05$ , maka variabel tersebut berpengaruh signifikan. (2) Uji F, yang menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap kemiskinan. (3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), yang menunjukkan seberapa besar variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh model regresi. Semakin tinggi nilai  $R^2$ , maka semakin baik model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

Dengan mengikuti seluruh tahapan analisis tersebut secara terstruktur, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya valid secara statistik, tetapi juga relevan secara substantif dalam menjelaskan pengaruh variabel ekonomi dan sosial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

### 3.3.5 Cross Section Effect

*Cross section effect* digunakan dalam analisis data panel untuk menangkap perbedaan karakteristik masing-masing unit observasi. Dalam penelitian ini, unit observasinya adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan daerah yang berbeda-beda.

Melalui pendekatan ini, setiap kabupaten/kota diberikan intersep yang berbeda sehingga mampu merepresentasikan pengaruh khusus dari masing-masing daerah terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian, model dapat menjelaskan variasi antar daerah secara lebih akurat tanpa mengabaikan faktor-faktor yang bersifat tetap pada tiap unit observasi.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk menginterpretasikan data yang telah dihimpun sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* dan *cross section* yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu 2019 hingga 2023. Proses estimasi regresi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EViews, menggunakan tiga pendekatan model panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Ketiga model ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel serta untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan total 175 observasi, yang berasal dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun pengamatan. Melalui pendekatan ini, diperoleh hasil estimasi dan uji statistik yang menunjukkan bagaimana masing-masing variabel memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil dari Observasi ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskripsi Data**

|              | Kemiskinan<br>(ribu jiwa) | Upah Minimum<br>(rupiah) | IPM<br>(persen) | Jumlah<br>Penduduk<br>(jiwa) | PDRB<br>(juta rupiah) |
|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Mean         | 111,1825                  | 2.019.597                | 73,08           | 1.043.143                    | 29.152.725,00         |
| Median       | 99,610                    | 1.986.450                | 71,99           | 1.017.767                    | 21.425.793,00         |
| Maximum      | 314,9500                  | 3.060.349                | 84,99           | 2.043.077                    | 162.000.000,00        |
| Minimum      | 7,450000                  | 1.610.000                | 66,11           | 121.526                      | 6.312.054             |
| Std. Dev.    | 62,27001                  | 237.004                  | 4,43            | 451.074                      | 26.537.643,00         |
| Observations | 175                       | 175                      | 175             | 175                          | 175                   |

Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2023 diolah

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 175 observasi data panel dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023, diperoleh informasi mengenai karakteristik utama dari lima variabel penelitian, yaitu kemiskinan, Upah Minimum Kab/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 111,1825 ribu jiwa, dengan nilai maksimum mencapai 314,9500 dan minimum 7,450000. Nilai standar deviasi sebesar 62,27001 menunjukkan tingkat penyebaran yang relatif besar antar wilayah dan tahun.

Untuk variabel upah minimum, nilai rata-ratanya adalah sebesar Rp2.019.597 per tahun, dengan rentang yang cukup lebar yaitu dari Rp1.610.000 (minimum) hingga Rp3.060.349 (maksimum). Standar deviasi yang relatif tinggi, yaitu sebesar Rp237.004, menunjukkan adanya variasi besar dalam kebijakan UMK antar kabupaten/kota. Demikian pula, nilai IPM memiliki rata-rata sebesar 73,08, dengan nilai maksimum 84,99 dan minimum 66,11. Nilai standar deviasi sebesar 4,43 menunjukkan variasi yang cukup moderat antar daerah.

Variabel jumlah penduduk menunjukkan rata-rata sebesar 1.043.143 jiwa, dengan nilai maksimum mencapai lebih dari 2 juta jiwa dan minimum hanya sekitar 121.526 jiwa. Nilai standar deviasi sebesar 451.074 menunjukkan variasi populasi yang besar antar kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang merefleksikan perbedaan luas wilayah dan tingkat urbanisasi. Sementara itu, PDRB menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp29.152.725.000 (29,1 miliar rupiah), dengan standar deviasi yang sangat besar, yaitu Rp26,5 miliar. Hal ini menunjukkan ketimpangan ekonomi yang signifikan antar daerah.

#### **4.2 Pemilihan Model Regresi**

Dalam regresi data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen, yaitu *Pooled Least Squares* (Pooled OLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model yang tepat menjadi langkah penting agar hasil estimasi yang diperoleh bersifat efisien, tidak bias, dan mampu mencerminkan kondisi sebenarnya dari data yang dianalisis. Setiap model memiliki asumsi dasar yang berbeda, tergantung pada apakah perbedaan antar unit observasi dianggap tetap atau bersifat acak. Untuk

menentukan model mana yang paling sesuai dengan karakteristik data dalam penelitian ini, digunakan dua jenis pengujian, yaitu Uji Chow yang digunakan untuk membandingkan antara Pooled OLS dan FEM, serta Uji Hausman yang bertujuan untuk menentukan pilihan antara FEM dan REM. Kedua uji ini diperlukan agar estimasi yang dilakukan memiliki dasar statistik yang kuat serta selaras dengan sifat struktural data panel yang digunakan.

#### 4.2.1 Uji Chow

Uji Chow merupakan tahap awal dalam pemilihan model regresi data panel yang bertujuan untuk menentukan apakah *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) lebih sesuai digunakan dalam menganalisis data. Secara teoritis, model *Common Effect* mengasumsikan bahwa data *cross-section* memiliki karakteristik yang seragam, sehingga tidak perlu dibedakan antar individu atau wilayah. Sementara itu, model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik tetap (*fixed*) antar individu atau entitas yang memengaruhi variabel dependen dan perlu dikontrol dalam model. Uji Chow dilakukan melalui pendekatan statistik *F-test* dan *Likelihood Ratio* (*Chi-Square test*) untuk mengetahui apakah pengaruh individu yang tetap secara statistik signifikan terhadap model.

Adapun hipotesis yang diuji dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

- a)  $H_0$  (Hipotesis nol): Model *Common Effect* lebih tepat (tidak ada efek individual yang signifikan).
- b)  $H_1$  (Hipotesis alternatif): Model *Fixed Effect* lebih tepat (ada efek individual yang signifikan).

**Tabel 4.2 Hasil Uji Chow**

|                                  |            |          |        |
|----------------------------------|------------|----------|--------|
| Redundant Fixed Effects Tests    |            |          |        |
| Equation: FIX                    |            |          |        |
| Test cross-section fixed effects |            |          |        |
|                                  |            |          |        |
| Effects Test                     | Statistic  | d.f.     | Prob.  |
| Cross-section F                  | 243.838946 | (34,136) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square         | 722.134834 | 34       | 0.0000 |
|                                  |            |          |        |

Berdasarkan hasil *Redundant Fixed Effects Test* yang ditampilkan pada output EViews, nilai statistik F sebesar 243,84 dengan derajat kebebasan (34,136) menghasilkan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,0000. Selain itu, uji Chi-square (*Likelihood Ratio*) juga menghasilkan nilai statistik sebesar 722,13 dengan derajat kebebasan 34 dan nilai probabilitas yang sama, yaitu 0,0000. Nilai probabilitas yang sangat kecil tersebut (lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%) memberikan dasar yang kuat untuk menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menerima hipotesis alternatif ( $H_1$ ).

Dengan demikian, interpretasi dari hasil ini adalah bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM). Artinya, terdapat pengaruh tetap (*fixed effects*) yang signifikan dari masing-masing kabupaten/kota terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan. Perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023 tidak dapat diabaikan dan perlu dimasukkan ke dalam model regresi untuk menghasilkan estimasi yang tidak bias. Oleh karena itu, FEM dipilih sebagai model awal yang akan diuji lebih lanjut pada tahap berikutnya melalui Uji Hausman, guna menentukan apakah model tetap (FEM) atau model acak (REM) yang paling sesuai dengan data.

#### 4.2.2 Uji Hausman

Setelah model *Fixed Effect* (FEM) ditetapkan sebagai model awal berdasarkan hasil Uji Chow, langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah model FEM atau *Random Effect Model* (REM) yang paling tepat digunakan. Secara konseptual, uji Hausman bertujuan untuk menguji apakah efek individual (*cross-section*) dalam model berkorelasi dengan variabel independen. Jika terdapat korelasi, maka

model *Fixed Effect* lebih sesuai karena mampu menangkap karakteristik tetap antar unit observasi. Sebaliknya, jika tidak ada korelasi, maka *Random Effect* lebih efisien karena mengasumsikan bahwa variasi antar individu bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas.

Hipotesis yang digunakan dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut:

- a)  $H_0$  (hipotesis nol): Model *Random Effect* (REM) lebih tepat, karena tidak terdapat korelasi antara efek individual dengan variabel independen.
- b)  $H_1$  (hipotesis alternatif): Model *Fixed Effect* (FEM) lebih tepat, karena terdapat korelasi antara efek individual dengan variabel independen.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman**

| Correlated Random Effects - Hausman Test |  |                   |              |        |
|------------------------------------------|--|-------------------|--------------|--------|
| Equation: Untitled                       |  |                   |              |        |
| Test cross-section random effects        |  |                   |              |        |
|                                          |  |                   |              |        |
| Test Summary                             |  | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
|                                          |  |                   |              |        |
| Cross-section random                     |  | 58.875530         | 4            | 0.0000 |
|                                          |  |                   |              |        |

Berdasarkan hasil Uji Hausman yang diperoleh melalui output analisis regresi data panel, nilai Chi-Square sebesar 58,88 dengan derajat kebebasan (df) 4 dan probabilitas (p-value) sebesar 0,0000 menunjukkan hasil yang sangat signifikan secara statistik. Nilai probabilitas yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) memberikan dasar yang kuat untuk menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa model *Random Effect* lebih tepat, karena tidak ada korelasi antara efek individual (*cross-section*) dan variabel independen. Dengan penolakan terhadap  $H_0$ , maka hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, yang menyatakan bahwa model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara karakteristik tetap masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan variabel-variabel penjelas seperti UMK, IPM, jumlah penduduk, dan PDRB. Oleh karena itu, *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih sebagai model estimasi akhir karena lebih mampu mengakomodasi perbedaan struktural antar wilayah dalam

menjelaskan tingkat kemiskinan secara akurat dan tidak bias.

#### 4.2.3 Uji Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian *Chow Test* dan *Hausman Test*, dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM), dan estimasi regresinya disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Hasil Regresi Model Fixed Effect**

|                                          |                       |                       |             |          |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
| Dependent Variable: KEMISKINAN           |                       |                       |             |          |
| Method: Panel Least Squares              |                       |                       |             |          |
| Date: 07/02/25 Time: 00:29               |                       |                       |             |          |
| Sample: 2019 2023                        |                       |                       |             |          |
| Periods included: 5                      |                       |                       |             |          |
| Cross-sections included: 35              |                       |                       |             |          |
| Total panel (balanced) observations: 175 |                       |                       |             |          |
|                                          |                       |                       |             |          |
| Variable                                 | Coefficient           | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
|                                          |                       |                       |             |          |
| C                                        | 685.9433              | 54.62807              | 12.55661    | 0.0000   |
| UPAH_MINIMUM                             | 5.15E-05              | 4.95E-06              | 10.42072    | 0.0000   |
| IPM                                      | -9.216686             | 0.869434              | -10.60079   | 0.0000   |
| JUMLAH_PENDUDUK                          | 5.89E-06              | 8.67E-06              | 0.679189    | 0.4982   |
| PDRB                                     | -3.92E-07             | 1.75E-07              | -2.239704   | 0.0267   |
|                                          |                       |                       |             |          |
|                                          | Effects Specification |                       |             |          |
|                                          |                       |                       |             |          |
| Cross-section fixed (dummy variables)    |                       |                       |             |          |
|                                          |                       |                       |             |          |
| R-squared                                | 0.997305              | Mean dependent var    |             | 111.1825 |
| Adjusted R-squared                       | 0.996552              | S.D. dependent var    |             | 62.27001 |
| S.E. of regression                       | 3.656606              | Akaike info criterion |             | 5.624531 |
| Sum squared resid                        | 1818.424              | Schwarz criterion     |             | 6.329826 |
| Log likelihood                           | -453.1465             | Hannan-Quinn criter.  |             | 5.910619 |
| F-statistic                              | 1324.327              | Durbin-Watson stat    |             | 1.725026 |
| Prob(F-statistic)                        | 0.000000              |                       |             |          |
|                                          |                       |                       |             |          |
|                                          |                       |                       |             |          |

#### 4.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel independen secara keseluruhan memengaruhi variabel dependen, serta untuk

mengevaluasi tingkat signifikansi dalam analisis regresi data panel. Proses ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) hasil estimasi terhadap batas signifikansi (*alpha*) yang telah ditentukan sebelumnya.

#### 4.4 Uji Statistik

##### 4.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau yang dikenal sebagai Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen dalam model regresi panel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan. Dalam konteks ini, variabel independen yang diuji meliputi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, dan PDRB. Uji F dilakukan dengan melihat nilai statistik F dan probabilitasnya pada model *Fixed Effect* yang telah terpilih sebagai model terbaik melalui uji Chow dan Hausman.

##### Hipotesis Penelitian :

- a)  $H_0$  (Hipotesis nol): Secara simultan, variabel independen UMK, IPM, jumlah penduduk, dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023.
- b)  $H_1$  (Hipotesis alternatif): Secara simultan, variabel independen UMK, IPM, jumlah penduduk, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2023.

Hipotesis ini digunakan dalam Uji F untuk menilai signifikansi simultan semua variabel dalam model regresi panel. Jika probabilitas  $< \alpha$  (0,05), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Berdasarkan hasil estimasi regresi *Fixed Effect*, diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 1324,327 dengan nilai probabilitas (*Prob. F-statistic*) sebesar 0,000000. Nilai probabilitas yang sangat kecil ini jauh di bawah tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), yang berarti hasilnya sangat signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa seluruh koefisien regresi variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan, diterima.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kombinasi variabel UMK, IPM,

jumlah penduduk, dan PDRB secara simultan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kelayakan secara statistik dan relevan untuk menjelaskan variasi kemiskinan antar wilayah dan waktu dalam konteks sosial ekonomi daerah.

#### 4.4.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial atau Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dari setiap koefisien regresi dengan tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Jika nilai *p-value*  $< 0,05$ , maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Berikut adalah rumusan hipotesis parsial untuk masing-masing variabel:

- a)  $H_0$ : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
- b)  $H_1$ : Variabel independen berpengaruh terhadap kemiskinan.

#### 1. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kemiskinan

Koefisien UMK sebesar 5,15E-05 dengan nilai t-statistic 10,42072 dan p-value 0,0000 menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Namun, arah pengaruh ini tidak sesuai dengan hipotesis  $H_1$  yang mengasumsikan pengaruh negatif. Dengan demikian, hipotesis  $H_1$  dinyatakan tidak terbukti. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan UMK justru diikuti oleh peningkatan kemiskinan, kemungkinan karena sektor informal dan UMKM mengalami tekanan akibat kenaikan biaya tenaga kerja.

## **2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan**

Koefisien IPM sebesar  $-9,2167$  dengan t-statistic  $-10,60079$  dan p-value  $0,0000$  menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini konsisten dengan hipotesis H2 dan mendukung teori capability approach Amartya Sen, bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli mampu memperluas kapabilitas individu untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis H2 terbukti.

## **3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan**

Koefisien jumlah penduduk sebesar  $5,89E-06$  dengan t-statistic  $0,679189$  dan p-value  $0,4982$  menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis H3 tidak terbukti.

## **4. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan**

Koefisien PDRB sebesar  $-3,92E-07$  dengan t-statistic  $-2,239704$  dan p-value  $0,0267$  menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil ini sesuai dengan hipotesis H4 dan mendukung pandangan teori pertumbuhan ekonomi klasik serta Kurva Kuznets bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis H4 terbukti.

Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa dari empat variabel independen, hanya IPM dan PDRB yang berpengaruh negatif signifikan sesuai hipotesis. UMK meskipun signifikan, tetapi arah pengaruhnya tidak sesuai hipotesis, sehingga H1 tidak terbukti. Sementara itu, jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan, sehingga H3 juga tidak terbukti. Dari variabel signifikan yang sesuai hipotesis, IPM memiliki pengaruh paling kuat dalam menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah.

### **4.5 Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil estimasi regresi Fixed Effect Model (FEM) pada tabel diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar  $0,9973$ . Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar  $99,73\%$  variasi dalam tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023 dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model, yaitu UMK, IPM, jumlah penduduk,

dan PDRB. Sementara itu, hanya sekitar 0,27% yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau kesalahan residu. Nilai  $R^2$  yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas yang sangat kuat dan secara statistik mampu menjelaskan hampir seluruh variasi kemiskinan di wilayah penelitian. Hal ini memperkuat validitas model dalam menganalisis pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap kemiskinan secara panel.

#### 4.6 Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil estimasi regresi, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 118,672 + 0,0000515\text{UMK} - 9,2167\text{IPM} - 0,000000392\text{PDRB} + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. **Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Namun, arah pengaruh tersebut **tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan** (hipotesis mengharapkan pengaruh negatif). Dengan demikian, hipotesis H1 tidak terbukti.

2. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil koefisien sebesar  $-9,2167$  menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% IPM dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 9,2167 ribu jiwa. Dengan demikian, hipotesis H2 terbukti.

3. **Jumlah Penduduk**

Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Oleh karena itu, pengaruh variabel ini tidak dapat diinterpretasikan lebih lanjut.

4. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Koefisien sebesar  $-0,000000392$  mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, meskipun pengaruhnya relatif kecil per satuan kenaikan. Dengan demikian, hipotesis H4 terbukti.

#### **4.7 Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan model Fixed Effect, diperoleh bahwa dari empat variabel independen yang diteliti, terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan negatif sesuai dengan hipotesis penelitian (IPM dan PDRB), satu variabel berpengaruh signifikan namun arah pengaruhnya tidak sesuai hipotesis (UMK), serta satu variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (jumlah penduduk). Temuan-temuan ini memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor utama yang menentukan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

##### **4.7.1 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kemiskinan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Dengan kata lain, kenaikan UMK justru diikuti oleh peningkatan angka kemiskinan. Temuan ini bertolak belakang dengan hipotesis awal (H1) yang mengasumsikan bahwa UMK memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, hipotesis H1 dinyatakan tidak terbukti.

Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori dualisme pasar tenaga kerja Lewis, yang menyatakan bahwa dalam perekonomian negara berkembang terdapat keterbelahan antara sektor formal dan informal. Di Jawa Tengah, sebagian besar pekerja masih terserap pada sektor informal yang tidak sepenuhnya mengikuti regulasi upah minimum. Kenaikan UMK lebih banyak membebani pelaku usaha kecil dan menengah, yang kemudian berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja (Manihuruk & Suhariato, 2024). Dengan demikian, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, kebijakan kenaikan UMK dalam konteks ini justru dapat mempersempit lapangan pekerjaan dan menambah jumlah penduduk miskin.

Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pengupahan di daerah berkembang harus mempertimbangkan kapasitas produktivitas tenaga kerja dan daya dukung sektor usaha. Kenaikan UMK yang tidak diiringi peningkatan keterampilan, produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja berisiko kontraproduktif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.

#### **4.7.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan**

Indeks Pembangunan Manusia terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi IPM suatu daerah, semakin rendah tingkat kemiskinannya. Hasil ini konsisten dengan hipotesis H2.

Secara teoretis, hasil ini sejalan dengan capability approach yang diperkenalkan oleh Amartya Sen. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan manusia bukan hanya soal peningkatan pendapatan, melainkan juga perluasan pilihan dan kapabilitas melalui akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dengan IPM yang lebih tinggi, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga risiko jatuh ke dalam kemiskinan semakin kecil.

Secara empiris, temuan ini konsisten dengan penelitian Arifin dan Hendriyani (2022) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, serta penelitian Sulistiani (2023) yang membuktikan bahwa di Jawa Tengah, kabupaten/kota dengan IPM tinggi seperti Kota Semarang memiliki tingkat kemiskinan jauh lebih rendah dibanding daerah dengan IPM rendah seperti Brebes atau Kebumen. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa investasi pada pembangunan manusia—melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial—merupakan strategi utama dalam mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah.

#### **4.7.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Artinya, hipotesis H3 tidak terbukti. Secara teoritis, pertumbuhan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan beban pembangunan karena memperbesar kebutuhan akan lapangan kerja, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Penelitian oleh Rizkina (2025) menemukan bahwa secara nasional jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 34 provinsi. Demikian pula, studi Angelia & Anitasari (2025) di Pulau Jawa menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berkontribusi pada meningkatnya jumlah penduduk miskin selama periode 2014–2022. Namun, berbeda dengan temuan tersebut, hasil penelitian ini justru memperlihatkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak signifikan memengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah.

Hal ini dapat dijelaskan oleh peran variabel lain, terutama IPM, yang lebih merefleksikan kualitas penduduk daripada sekadar jumlahnya. Dengan demikian, pengendalian jumlah penduduk saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan tanpa disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia.

#### **4.7.4 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, sesuai dengan hipotesis H4. Artinya, peningkatan PDRB yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah mampu menurunkan angka kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik yang menekankan peran pertumbuhan dalam meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung hipotesis Kurva Kuznets yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi akan disertai dengan pemerataan pendapatan. Secara empiris, penelitian ini konsisten dengan temuan Arifin dan Wahid (2020) di Aceh yang menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB berkontribusi nyata dalam menurunkan kemiskinan, serta Alvin dan Hukom (2023) yang menemukan hasil serupa di Kalimantan Tengah.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengurangi kemiskinan jika tidak bersifat inklusif. Pertumbuhan yang hanya terfokus pada sektor modern dan perkotaan berisiko memperlebar kesenjangan. Oleh

sebab itu, strategi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah harus diarahkan pada sektor padat karya dan daerah tertinggal agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa IPM dan PDRB merupakan dua variabel utama yang berkontribusi menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah. Sementara itu, UMK memberikan hasil yang berlawanan dengan hipotesis dan berpotensi kontraproduktif bila tidak diiringi produktivitas, sedangkan jumlah penduduk tidak memberikan pengaruh signifikan. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta reformulasi kebijakan pengupahan yang sesuai dengan kondisi sektor informal dan kapasitas daerah.

#### 4.8 Cross Section Effect

Perbedaan konstanta pada setiap Kabupaten Kota terlihat dari *cross section Fixed Effect* sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Hasil *Cross Section Effect***

| No. | KAB/KOTA               | Effect     | Intercept | Intercept + effect |
|-----|------------------------|------------|-----------|--------------------|
| 1   | Kabupaten Cilacap      | 7.158.765  | 6.859.433 | 14.018.198         |
| 2   | Kabupaten Banyumas     | 1.110.101  | 6.859.433 | 7.969.534          |
| 3   | Kabupaten Purbalingga  | -510444    | 6.859.433 | 6.348.989          |
| 4   | Kabupaten Banjarnegara | -8.089.445 | 6.859.433 | -1.230.012         |
| 5   | Kabupaten Kebumen      | 6.935.815  | 6.859.433 | 13.795.248         |
| 6   | Kabupaten Purworejo    | -2.331.412 | 6.859.433 | 4.528.021          |
| 7   | Kabupaten Wonosobo     | -1.872.569 | 6.859.433 | 4.986.864          |
| 8   | Kabupaten Magelang     | 4.300.897  | 6.859.433 | 11.160.330         |
| 9   | Kabupaten Boyolali     | 1.169.559  | 6.859.433 | 8.028.992          |
| 10  | Kabupaten Klaten       | 6.776.416  | 6.859.433 | 13.635.849         |
| 11  | Kabupaten Sukoharjo    | 1.388.711  | 6.859.433 | 8.248.144          |
| 12  | Kabupaten Wonogiri     | -2.051.307 | 6.859.433 | 4.808.126          |
| 13  | Kabupaten Karanganyar  | 8.042.687  | 6.859.433 | 14.902.120         |
| 14  | Kabupaten Sragen       | 2.664.912  | 6.859.433 | 9.524.345          |
| 15  | Kabupaten Grobogan     | 3.447.324  | 6.859.433 | 10.306.757         |
| 16  | Kabupaten Blora        | -3.841.902 | 6.859.433 | 3.017.531          |
| 17  | Kabupaten Rembang      | -3.091.435 | 6.859.433 | 3.767.998          |

| No. | KAB/KOTA             | Effect     | Intercept | Intercept + effect |
|-----|----------------------|------------|-----------|--------------------|
| 18  | Kabupaten Pati       | 9.083.875  | 6.859.433 | <b>15.943.308</b>  |
| 19  | Kabupaten Kudus      | -1.895.484 | 6.859.433 | 4.963.949          |
| 20  | Kabupaten Jepara     | -3.288.889 | 6.859.433 | 3.570.544          |
| 21  | Kabupaten Demak      | 2.519.832  | 6.859.433 | 9.379.265          |
| 22  | Kabupaten Semarang   | -3.002.286 | 6.859.433 | 3.857.147          |
| 23  | Kabupaten Temanggung | -5.819.043 | 6.859.433 | 1.040.390          |
| 24  | Kabupaten Kendal     | -3.266.097 | 6.859.433 | 3.593.336          |
| 25  | Kabupaten Batang     | -8.569.263 | 6.859.433 | <b>-1.709.830</b>  |
| 26  | Kabupaten Pekalongan | -5.308.297 | 6.859.433 | 1.551.136          |
| 27  | Kabupaten Pemalang   | 3.442.211  | 6.859.433 | 10.301.644         |
| 28  | Kabupaten Tegal      | -3.468.799 | 6.859.433 | 3.390.634          |
| 29  | Kabupaten Brebes     | 1.341.418  | 6.859.433 | 8.200.851          |
| 30  | Kota Magelang        | -3.786.797 | 6.859.433 | 3.072.636          |
| 31  | Kota Surakarta       | 3.063.613  | 6.859.433 | 9.923.046          |
| 32  | Kota Salatiga        | -8.321.023 | 6.859.433 | -1.461.590         |
| 33  | Kota Semarang        | 6.870.141  | 6.859.433 | 13.729.574         |
| 34  | Kota Pekalongan      | -7.566.158 | 6.859.433 | -706.725           |
| 35  | Kota Tegal           | -6.673.118 | 6.859.433 | 186.315            |

Pada Tabel 4.5 yang disajikan di atas, terlihat bahwa nilai intersept untuk setiap kabupaten berbeda-beda. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Pati, yang ditunjukkan oleh nilai konstanta sebesar 15.943.308, sedangkan kemiskinan terendah terjadi di Kabupaten Batang, dengan nilai konstanta sebesar -1.709.830. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Batang berhasil menekan tingkat kemiskinan dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Tengah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a) Pengaruh UMK terhadap kemiskinan

UMK memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, kenaikan UMK justru diikuti dengan peningkatan angka kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah tanpa disertai dengan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja dapat menekan sektor informal dan memperluas pengangguran.

b) Pengaruh IPM terhadap kemiskinan

IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata.

c) Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan

Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan secara parsial. Namun demikian, variabel ini tetap memberikan kontribusi dalam model secara simultan bersama variabel lainnya.

d) Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan

PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, pertumbuhan ekonomi daerah berperan penting dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, meskipun pengaruhnya relatif kecil per kenaikan satuan PDRB.

#### **5.2 Implikasi Penelitian**

##### **5.2.1 Implikasi Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat literatur pembangunan ekonomi dan kemiskinan regional dengan menegaskan bahwa IPM dan PDRB memiliki peran penting dalam menurunkan kemiskinan. Temuan mengenai UMK yang justru berpengaruh positif terhadap kemiskinan memberikan kontribusi baru bagi kajian teoritis, karena menantang asumsi klasik bahwa kenaikan upah selalu menurunkan

kemiskinan. Hal ini menekankan pentingnya analisis kontekstual dalam memahami kebijakan pengupahan di daerah berkembang.

### **5.2.2 Implikasi Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pertama, peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang merata perlu terus diperkuat karena terbukti efektif menekan kemiskinan. Kedua, kebijakan UMK harus disusun lebih hati-hati dengan memperhatikan produktivitas dan kapasitas sektor usaha agar tidak menimbulkan dampak kontraproduktif terhadap kemiskinan. Ketiga, penguatan PDRB perlu diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh kelompok masyarakat miskin.

### **5.3 Keterbatasan penelitian**

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah penggunaan variabel makro agregat yang tidak menangkap variasi mikro, seperti jenis pekerjaan, distribusi pendapatan, dan kepemilikan aset rumah tangga. Selain itu, model ini tidak mengontrol efek spasial antar wilayah atau shock makroekonomi nasional yang mungkin mempengaruhi angka kemiskinan selama pandemi COVID-19. Penelitian ini juga hanya menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga tidak menangkap dinamika sosial-budaya yang turut memengaruhi kemiskinan.

### **5.4 Saran**

Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang ditemukan, berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Bagi Pemerintah Daerah, disarankan untuk lebih selektif dan kontekstual dalam menetapkan UMK, dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kemampuan pelaku usaha. Program pelatihan keterampilan kerja dan pembukaan lapangan kerja berbasis komunitas harus diperkuat agar UMK tidak berdampak negatif terhadap tenaga kerja informal.
2. Bagi Perencana Pembangunan, penting untuk menjadikan IPM sebagai

indikator utama dalam pengalokasian anggaran daerah. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar harus menjadi prioritas dalam strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan variabel, seperti memasukkan variabel ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan kualitas infrastruktur. Selain itu, penggunaan pendekatan spasial atau metode kuantitatif-kualitatif terpadu akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kemiskinan.
4. Untuk Pengembangan Akademik, perlu dilakukan kajian lanjut terhadap hubungan tidak linear antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, serta menguji dampak kebijakan makro-fiskal secara mikro, khususnya pada kelompok rentan. Penelitian mendatang juga sebaiknya mempertimbangkan efek jangka panjang dari pandemi terhadap dinamika kesejahteraan dan kemiskinan.

Dengan saran-saran tersebut, diharapkan penelitian-penelitian ke depan dapat meningkatkan validitas eksternal dan kedalaman analisis, serta menghasilkan kebijakan publik yang lebih berbasis data dan berorientasi pada pemerataan sosial ekonomi di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaddien, I. (2019, March). Faktor determinan keparahan dan kedalaman kemiskinan Jawa Barat dengan regresi data panel. In *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 21(1), 87-96.
- Alvin, A., & Hukom, A. (2023). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2022. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 29(1), 85-96.
- Angelia, F., & Anitasari, M. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2014-2022. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2796-2806. <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i4.1559>
- Anggoro, D., & Kriswibowo, A. . (2023). Analysis of the Effect of Gross Regional Domestic Product, Unemployment and Human Development Index on Poverty in East Java, Indonesia. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 4(1), 383–394. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v4i2.1938>
- Arifin, N., & Hendriyani, Y. (2022). PDRB, IPM, dan kemiskinan di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 3(2), 87-103..
- Aziz, A., & Husenudin, A. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 1450-1466.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Data dan informasi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2019–2023. BPS Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/publication/2024/04/05/ff1f6f18184a13ff9e3316c2/data-dan-informasi-kemiskinan-provinsi-jawa-tengah-2019-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data dan informasi Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2019–2023. BPS Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data dan informasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Provinsi Jawa Tengah 2019–2023. BPS Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODcjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data dan informasi PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Provinsi Jawa Tengah 2019–2023. BPS Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI4MCMY/pdrb-jawa-tengah->

[atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html](https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzA4IzI=/upah-minimum-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html)

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data dan informasi upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2019–2023. BPS Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzA4IzI=/upah-minimum-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Delistiawati, N. (2018). Upaya kelompok ekonomi menengah atas dalam menangani kemiskinan. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 12(2), 72-77..
- Haya, S. F., Fadilah, T., Rahayu, S., & Nasution, J. (2022). Dampak kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(4), 55-68.
- Manihuruk, F. E., & Suharianto, J. (2024). Analisis Pengaruh IPM, TPT, dan UMR Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia dengan Menggunakan Regresi Data Panel. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 18(2), 245-257.
- Mulyani, P. A. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Kultural Dan Model Pengentasan Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 3(1), 11-23.
- Nasution, L. N., Nasution, D. P., & Lubis, A. I. F. (2020). Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara: Lia Nazliana Nasution; Diwayana Putri Nasution; Annisa Ilmi Faried Lubis. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 5(1), 73-77.
- Nurkse, R. (1953). Problems of capital formation in underdeveloped countries. *Blackwell*: Oxford.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1.
- Paramita, A. I. D., & Purbadharmaja, I. P. (2015). Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10), 44574.
- Pratama, A. ., & Ratih, A. . (2023). The Influence of Wages, Human Development Index, And Gross Regional Domestic Product on Poverty in Provinces in Indonesia. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS Journal)*, 2(5), 1203–1212.
- Prawoto, N. (2024). Determinants of Poverty in Indonesia: A Dynamic Panel Analysis of Economic and Social Factors across 20 Provinces. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 52–62. <https://doi.org/10.59086/jam.v3i3.609>
- Purnomo, D., Utami, D., & Slamet Sukardi, A. (2021). Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia. *Prosiding University Research*

*Colloquium*, 71–80.

- Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Majalah Imiah Manajemen dan Bisnis*, 18(1), 10-19.
- Rapii, M. R. (2022). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kemiskinan Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Sembalun Lombok Timur Pada Masa Covid-19. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi (JUPEA)*, 2(1), 30-38.
- Rizkina, A., Qadafi, M., Asnita, Y., Afriana, & Ariga, H. P. S. (2025). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus 34 Provinsi). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1964-1971. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v1i3.4246>
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan resiko kemiskinan di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 53-66.
- Sukarno, Z. S., & Bongaya, M. (2019). Menata masyarakat prasejahtera dalam penguatan ekonomi di kota makassar. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Bisnis*, 1(3), 183-189.
- Sulistiani, L. S. (2023). Najmudin.(2023). *Analysis Of The Poverty Level And Human Development Index In Central Java For The 2016-2021 Period. Economics and Finance*, 11(3). 28-41.
- Sutrisno, Y. R., & Arifin, Z. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 8(01), 15-25.
- Wijaksana, A. C. (2022). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Periode Tahun 2016-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 99-113.
- Yulasteriyani, Y., Randi, R., & Hasbi, M. (2019). Kemiskinan Masyarakat di Indonesia: Perspektif Sosiologi Islam dan Fenomenologi Barat. *Intizar*, 25(2), 77-86.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Data Penelitian

| Kab/Kota               | Tahun | Kemiskinan<br>(ribu jiwa) | Upah<br>Minimum<br>(rupiah) | IPM<br>(persen) | Jumlah<br>Penduduk<br>(jiwa) | PDRB<br>(juta rupiah) |
|------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Kabupaten Cilacap      | 2019  | 185,2                     | 1.989.058                   | 69,98           | 1.727.098                    | 100.327.299           |
| Kabupaten Cilacap      | 2020  | 198,6                     | 2.158.327                   | 69,95           | 1.944.857                    | 90.011.584            |
| Kabupaten Cilacap      | 2021  | 201,71                    | 2.228.904                   | 70,42           | 1.963.824                    | 91.944.588            |
| Kabupaten Cilacap      | 2022  | 190,96                    | 2.230.731                   | 70,99           | 1.988.622                    | 96.677.843            |
| Kabupaten Cilacap      | 2023  | 191                       | 2.383.090                   | 71,83           | 2.007.829                    | 101.839.741           |
| Kabupaten Banyumas     | 2019  | 211,6                     | 1.750.000                   | 71,96           | 1.693.006                    | 39.779.321            |
| Kabupaten Banyumas     | 2020  | 225,84                    | 1.900.000                   | 71,98           | 1.776.918                    | 39.121.624            |
| Kabupaten Banyumas     | 2021  | 232,91                    | 1.970.000                   | 72,44           | 1.789.630                    | 40.686.808            |
| Kabupaten Banyumas     | 2022  | 220,47                    | 1.983.261                   | 73,17           | 1.806.013                    | 43.069.504            |
| Kabupaten Banyumas     | 2023  | 216,5                     | 2.118.124                   | 73,86           | 1.828.573                    | 45.396.302            |
| Kabupaten Purbalingga  | 2019  | 140,1                     | 1.788.500                   | 68,99           | 933.989                      | 17.387.611            |
| Kabupaten Purbalingga  | 2020  | 149,48                    | 1.940.800                   | 68,97           | 998.561                      | 17.182.874            |
| Kabupaten Purbalingga  | 2021  | 153,08                    | 1.988.000                   | 69,15           | 1.007.794                    | 17.731.438            |
| Kabupaten Purbalingga  | 2022  | 145,33                    | 1.996.814                   | 69,54           | 1.019.840                    | 18.690.729            |
| Kabupaten Purbalingga  | 2023  | 143,41                    | 2.130.981                   | 70,24           | 1.027.333                    | 19.533.864            |
| Kabupaten Banjarnegara | 2019  | 136,1                     | 1.610.000                   | 67,34           | 923.192                      | 15.246.866            |
| Kabupaten Banjarnegara | 2020  | 144,95                    | 1.748.000                   | 67,45           | 1.017.767                    | 15.045.885            |
| Kabupaten Banjarnegara | 2021  | 150,19                    | 1.805.000                   | 67,86           | 1.026.866                    | 15.536.478            |
| Kabupaten Banjarnegara | 2022  | 141,25                    | 1.819.835                   | 68,61           | 1.038.718                    | 16.359.106            |
| Kabupaten Banjarnegara | 2023  | 138,99                    | 1.958.170                   | 69,14           | 1.047.226                    | 17.173.452            |
| Kabupaten Kebumen      | 2019  | 201,3                     | 1.686.000                   | 69,6            | 1.197.982                    | 19.815.063            |
| Kabupaten Kebumen      | 2020  | 211,09                    | 1.835.000                   | 69,81           | 1.350.438                    | 19.527.665            |
| Kabupaten Kebumen      | 2021  | 212,92                    | 1.895.000                   | 70,05           | 1.361.913                    | 20.253.059            |
| Kabupaten Kebumen      | 2022  | 196,16                    | 1.906.781                   | 70,79           | 1.376.825                    | 21.425.793            |
| Kabupaten Kebumen      | 2023  | 195,45                    | 2.035.890                   | 71,37           | 1.397.555                    | 22.638.895            |

| Kab/Kota               | Tahun | Kemiskinan<br>(ribu jiwa) | Upah<br>Minimum<br>(rupiah) | IPM<br>(persen) | Jumlah<br>Penduduk<br>(jiwa) | PDRB<br>(juta rupiah) |
|------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Kabupaten<br>Purworejo | 2019  | 82,2                      | 1.700.000                   | 72,5            | 718.316                      | 13.353.336            |
| Kabupaten<br>Purworejo | 2020  | 84,79                     | 1.845.000                   | 72,68           | 769.880                      | 13.138.294,11         |
| Kabupaten<br>Purworejo | 2021  | 88,8                      | 1.905.400                   | 72,98           | 773.588                      | 13.573.470            |
| Kabupaten<br>Purworejo | 2022  | 82,64                     | 1.911.850                   | 73,6            | 778.257                      | 14.300.557            |
| Kabupaten<br>Purworejo | 2023  | 81,28                     | 2.043.902                   | 74,28           | 788.265                      | 15.025.909            |
| Kabupaten<br>Wonosobo  | 2019  | 131,3                     | 1.712.500                   | 68,27           | 790.504                      | 13.793.040            |
| Kabupaten<br>Wonosobo  | 2020  | 137,63                    | 1.859.000                   | 68,22           | 879.124                      | 13.566.176            |
| Kabupaten<br>Wonosobo  | 2021  | 139,67                    | 1.920.000                   | 68,43           | 886.613                      | 14.064.765            |
| Kabupaten<br>Wonosobo  | 2022  | 128,11                    | 1.931.285                   | 68,89           | 896.346                      | 14.770.504            |
| Kabupaten<br>Wonosobo  | 2023  | 123,7                     | 2.076.209                   | 69,37           | 909.664                      | 15.405.985            |
| Kabupaten Magelang     | 2019  | 137,4                     | 1.882.000                   | 69,87           | 1.290.591                    | 23.253.154            |
| Kabupaten Magelang     | 2020  | 146,34                    | 2.042.200                   | 69,87           | 1.299.859                    | 22.865.152            |
| Kabupaten Magelang     | 2021  | 154,91                    | 2.075.000                   | 70,12           | 1.305.512                    | 23.661.713            |
| Kabupaten Magelang     | 2022  | 145,33                    | 2.081.807                   | 70,85           | 1.312.573                    | 24.953.185            |
| Kabupaten Magelang     | 2023  | 144,49                    | 2.236.777                   | 71,45           | 1.330.656                    | 26.211.563            |
| Kabupaten Boyolali     | 2019  | 93,7                      | 1.790.000                   | 73,8            | 984.807                      | 22.681.098            |
| Kabupaten Boyolali     | 2020  | 100,59                    | 1.942.500                   | 74,25           | 1.062.713                    | 22.409.733            |
| Kabupaten Boyolali     | 2021  | 104,82                    | 2.000.000                   | 74,4            | 1.070.247                    | 23.447.366            |
| Kabupaten Boyolali     | 2022  | 97,18                     | 2.010.299                   | 74,97           | 1.079.952                    | 24.931.305            |
| Kabupaten Boyolali     | 2023  | 97,48                     | 2.155.712                   | 75,41           | 1.090.129                    | 26.334.296            |
| Kabupaten Klaten       | 2019  | 144,1                     | 1.795.061                   | 75,29           | 1.174.986                    | 27.805.994            |
| Kabupaten Klaten       | 2020  | 151,83                    | 1.947.821                   | 75,56           | 1.260.506                    | 27.480.359            |
| Kabupaten Klaten       | 2021  | 158,23                    | 2.011.515                   | 76,12           | 1.267.272                    | 28.531.109            |
| Kabupaten Klaten       | 2022  | 144,87                    | 2.015.623                   | 76,95           | 1.275.850                    | 30.214.982            |
| Kabupaten Klaten       | 2023  | 144,43                    | 2.152.323                   | 77,59           | 1.284.386                    | 31.938.327            |
| Kabupaten Sukoharjo    | 2019  | 63,6                      | 1.783.500                   | 76,84           | 891.912                      | 27.076.443            |
| Kabupaten Sukoharjo    | 2020  | 68,89                     | 1.938.000                   | 76,98           | 907.587                      | 26.616.503            |
| Kabupaten Sukoharjo    | 2021  | 73,84                     | 1.986.450                   | 77,13           | 911.603                      | 27.634.118            |
| Kabupaten Sukoharjo    | 2022  | 68,72                     | 1.998.153                   | 77,94           | 916.627                      | 29.185.354            |
| Kabupaten Sukoharjo    | 2023  | 68,79                     | 2.138.248                   | 78,65           | 932.680                      | 30.661.917            |

| Kab/Kota                 | Tahun | Kemiskinan<br>(ribu jiwa) | Upah<br>Minimum<br>(rupiah) | IPM<br>(persen) | Jumlah<br>Penduduk<br>(jiwa) | PDRB<br>(juta rupiah) |
|--------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Kabupaten Wonogiri       | 2019  | 98,3                      | 1.655.000                   | 69,98           | 959.492                      | 20.856.209            |
| Kabupaten Wonogiri       | 2020  | 104,37                    | 1.797.000                   | 70,25           | 1.043.177                    | 20.563.144            |
| Kabupaten Wonogiri       | 2021  | 110,46                    | 1.827.000                   | 70,49           | 1.049.292                    | 21.251.165            |
| Kabupaten Wonogiri       | 2022  | 105,19                    | 1.839.043                   | 71,04           | 1.057.087                    | 22.448.630            |
| Kabupaten Wonogiri       | 2023  | 104,82                    | 1.968.448                   | 71,97           | 1.051.085                    | 23.566.879            |
| Kabupaten<br>Karanganyar | 2019  | 84,5                      | 1.833.000                   | 75,89           | 886.519                      | 26.599.744            |
| Kabupaten<br>Karanganyar | 2020  | 91,72                     | 1.989.000                   | 75,86           | 931.963                      | 26.103.228            |
| Kabupaten<br>Karanganyar | 2021  | 95,41                     | 2.054.040                   | 75,99           | 938.808                      | 27.039.608            |
| Kabupaten<br>Karanganyar | 2022  | 88,56                     | 2.064.313                   | 76,58           | 947.642                      | 28.624.990            |
| Kabupaten<br>Karanganyar | 2023  | 88,64                     | 2.207.484                   | 77,31           | 955.116                      | 30.208.236            |
| Kabupaten Sragen         | 2019  | 113,8                     | 1.673.500                   | 73,43           | 890.518                      | 26.853.059            |
| Kabupaten Sragen         | 2020  | 119,38                    | 1.815.915                   | 73,95           | 976.951                      | 26.367.261            |
| Kabupaten Sragen         | 2021  | 122,91                    | 1.829.500                   | 74,08           | 983.641                      | 27.355.146            |
| Kabupaten Sragen         | 2022  | 115,14                    | 1.839.429                   | 74,65           | 992.243                      | 28.929.809            |
| Kabupaten Sragen         | 2023  | 114,62                    | 1.969.569                   | 75,1            | 997.485                      | 30.442.193            |
| Kabupaten Grobogan       | 2019  | 161,9                     | 1.685.500                   | 69,86           | 1.377.788                    | 19.692.631            |
| Kabupaten Grobogan       | 2020  | 172,26                    | 1.830.000                   | 69,87           | 1.453.526                    | 19.383.027            |
| Kabupaten Grobogan       | 2021  | 175,72                    | 1.890.000                   | 70,41           | 1.460.873                    | 20.115.534            |
| Kabupaten Grobogan       | 2022  | 163,2                     | 1.894.032                   | 70,97           | 1.470.150                    | 21.318.155            |
| Kabupaten Grobogan       | 2023  | 162,52                    | 2.029.569                   | 71,49           | 1.492.891                    | 22.380.304            |
| Kabupaten Blora          | 2019  | 97,9                      | 1.690.000                   | 68,65           | 865.013                      | 18.318.415            |
| Kabupaten Blora          | 2020  | 103,73                    | 1.834.000                   | 68,84           | 884.333                      | 17.483.887            |
| Kabupaten Blora          | 2021  | 107,05                    | 1.894.000                   | 69,37           | 886.147                      | 18.126.447            |
| Kabupaten Blora          | 2022  | 99,83                     | 1.904.196                   | 69,95           | 888.224                      | 18.608.610            |
| Kabupaten Blora          | 2023  | 99,61                     | 2.040.080                   | 70,63           | 901.621                      | 19.184.919            |
| Kabupaten Rembang        | 2019  | 95,3                      | 1.660.000                   | 70,15           | 638.188                      | 13.612.335            |
| Kabupaten Rembang        | 2020  | 100,08                    | 1.802.000                   | 70,02           | 645.333                      | 13.409.631            |
| Kabupaten Rembang        | 2021  | 101,4                     | 1.861.000                   | 70,43           | 647.766                      | 13.925.516            |
| Kabupaten Rembang        | 2022  | 94,56                     | 1.874.322                   | 71              | 650.770                      | 14.698.844            |
| Kabupaten Rembang        | 2023  | 91,97                     | 2.015.927                   | 71,89           | 660.166                      | 15.463.553            |
| Kabupaten Pati           | 2019  | 119                       | 1.742.000                   | 71,35           | 1.259.590                    | 30.885.379            |
| Kabupaten Pati           | 2020  | 127,37                    | 1.891.000                   | 71,77           | 1.324.188                    | 30.527.473            |
| Kabupaten Pati           | 2021  | 128,74                    | 1.953.000                   | 72,28           | 1.330.983                    | 31.559.079            |

| Kab/Kota                | Tahun | Kemiskinan<br>(ribu jiwa) | Upah<br>Minimum<br>(rupiah) | IPM<br>(persen) | Jumlah<br>Penduduk<br>(jiwa) | PDRB<br>(juta rupiah) |
|-------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Kabupaten Pati          | 2022  | 118,04                    | 1.968.339                   | 73,14           | 1.339.572                    | 33.312.381            |
| Kabupaten Pati          | 2023  | 118,18                    | 2.107.697                   | 73,59           | 1.359.364                    | 34.984.663            |
| Kabupaten Kudus         | 2019  | 58                        | 2.044.468                   | 74,94           | 871.311                      | 73.241.777            |
| Kabupaten Kudus         | 2020  | 64,24                     | 2.218.452                   | 75              | 849.184                      | 70.964.725            |
| Kabupaten Kudus         | 2021  | 67,06                     | 2.290.995                   | 75,16           | 852.443                      | 69.872.178            |
| Kabupaten Kudus         | 2022  | 66,06                     | 2.293.058                   | 75,89           | 856.472                      | 71.416.927            |
| Kabupaten Kudus         | 2023  | 65,16                     | 2.439.814                   | 76,71           | 874.632                      | 72.984.397            |
| Kabupaten Jepara        | 2019  | 83,5                      | 1.879.031                   | 71,88           | 1.257.912                    | 21.384.283            |
| Kabupaten Jepara        | 2020  | 91,14                     | 2.040.000                   | 71,99           | 1.184.947                    | 20.973.089            |
| Kabupaten Jepara        | 2021  | 95,22                     | 2.107.000                   | 72,36           | 1.188.510                    | 21.944.232            |
| Kabupaten Jepara        | 2022  | 89,08                     | 2.108.403                   | 73,15           | 1.192.811                    | 23.249.853            |
| Kabupaten Jepara        | 2023  | 86,75                     | 2.272.627                   | 73,85           | 1.221.086                    | 24.451.040            |
| Kabupaten Demak         | 2019  | 137,6                     | 2.240.000                   | 71,87           | 1.162.805                    | 18.417.010            |
| Kabupaten Demak         | 2020  | 146,87                    | 2.432.000                   | 72,22           | 1.203.956                    | 18.374.562            |
| Kabupaten Demak         | 2021  | 151,74                    | 2.511.526                   | 72,57           | 1.212.377                    | 18.856.416            |
| Kabupaten Demak         | 2022  | 143,01                    | 2.513.005                   | 73,36           | 1.223.217                    | 19.846.431            |
| Kabupaten Demak         | 2023  | 143,26                    | 2.680.421                   | 74,07           | 1.240.510                    | 20.839.746            |
| Kabupaten Semarang      | 2019  | 73,9                      | 2.055.000                   | 74,14           | 1.053.786                    | 35.638.962            |
| Kabupaten Semarang      | 2020  | 79,88                     | 2.229.881                   | 74,1            | 1.053.094                    | 34.688.037            |
| Kabupaten Semarang      | 2021  | 83,61                     | 2.302.798                   | 74,24           | 1.059.844                    | 35.948.862            |
| Kabupaten Semarang      | 2022  | 78,6                      | 2.311.254                   | 74,67           | 1.068.492                    | 37.857.919            |
| Kabupaten Semarang      | 2023  | 78,35                     | 2.480.988                   | 75,13           | 1.080.648                    | 39.651.856            |
| Kabupaten<br>Temanggung | 2019  | 72,6                      | 1.682.027                   | 69,56           | 772.018                      | 15.214.059            |
| Kabupaten<br>Temanggung | 2020  | 77,33                     | 1.825.200                   | 69,57           | 790.174                      | 14.890.755            |
| Kabupaten<br>Temanggung | 2021  | 79,09                     | 1.885.000                   | 69,88           | 794.403                      | 15.387.930            |
| Kabupaten<br>Temanggung | 2022  | 73,04                     | 1.887.832                   | 70,77           | 799.764                      | 16.187.375            |
| Kabupaten<br>Temanggung | 2023  | 72,96                     | 2.027.569                   | 71,33           | 808.446                      | 16.997.527            |
| Kabupaten Kendal        | 2019  | 91,2                      | 2.084.393                   | 71,97           | 971.086                      | 30.916.386            |
| Kabupaten Kendal        | 2020  | 97,49                     | 2.261.775                   | 72,29           | 1.018.505                    | 30.449.024            |
| Kabupaten Kendal        | 2021  | 100                       | 2.335.735                   | 72,5            | 1.025.020                    | 31.632.276            |
| Kabupaten Kendal        | 2022  | 93,03                     | 2.340.312                   | 73,19           | 1.033.367                    | 33.428.957            |
| Kabupaten Kendal        | 2023  | 92,64                     | 2.508.300                   | 73,86           | 1.052.826                    | 35.286.234            |
| Kabupaten Batang        | 2019  | 64,1                      | 1.900.000                   | 68,42           | 768.583                      | 15.226.787            |

| Kab/Kota                | Tahun | Kemiskinan<br>(ribu jiwa) | Upah<br>Minimum<br>(rupiah) | IPM<br>(persen) | Jumlah<br>Penduduk<br>(jiwa) | PDRB<br>(juta rupiah) |
|-------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Kabupaten Batang        | 2020  | 70,57                     | 2.061.700                   | 68,65           | 801.718                      | 15.031.084            |
| Kabupaten Batang        | 2021  | 74,91                     | 2.129.117                   | 68,92           | 807.005                      | 15.764.266            |
| Kabupaten Batang        | 2022  | 69,94                     | 2.135.535                   | 69,45           | 813.791                      | 16.704.987            |
| Kabupaten Batang        | 2023  | 69,97                     | 2.282.026                   | 70,2            | 828.883                      | 17.629.389            |
| Kabupaten<br>Pekalongan | 2019  | 87                        | 1.859.885                   | 69,71           | 897.711                      | 16.356.351            |
| Kabupaten<br>Pekalongan | 2020  | 91,86                     | 2.018.161                   | 69,63           | 968.821                      | 16.047.512            |
| Kabupaten<br>Pekalongan | 2021  | 95,26                     | 2.084.155                   | 70,11           | 976.504                      | 16.615.066            |
| Kabupaten<br>Pekalongan | 2022  | 87,53                     | 2.094.646                   | 70,81           | 986.455                      | 17.463.416            |
| Kabupaten<br>Pekalongan | 2023  | 87,93                     | 2.247.346                   | 71,4            | 1.007.384                    | 18.361.079            |
| Kabupaten Pemalang      | 2019  | 200,7                     | 1.718.000                   | 66,32           | 1.302.813                    | 18.267.200            |
| Kabupaten Pemalang      | 2020  | 209,03                    | 1.865.000                   | 66,32           | 1.471.489                    | 18.155.597            |
| Kabupaten Pemalang      | 2021  | 215,08                    | 1.926.000                   | 66,56           | 1.484.209                    | 18.933.195            |
| Kabupaten Pemalang      | 2022  | 195,84                    | 1.940.890                   | 67,19           | 1.500.754                    | 19.895.235            |
| Kabupaten Pemalang      | 2023  | 195,57                    | 2.081.783                   | 68,03           | 1.523.622                    | 20.719.582            |
| Kabupaten Tegal         | 2019  | 109,9                     | 1.747.000                   | 68,24           | 1.440.698                    | 24.861.496            |
| Kabupaten Tegal         | 2020  | 117,5                     | 1.896.000                   | 68,39           | 1.596.996                    | 24.492.625            |
| Kabupaten Tegal         | 2021  | 123,52                    | 1.958.000                   | 68,79           | 1.608.611                    | 25.401.911            |
| Kabupaten Tegal         | 2022  | 113,62                    | 1.968.446                   | 69,53           | 1.623.595                    | 26.705.267            |
| Kabupaten Tegal         | 2023  | 105,03                    | 2.106.238                   | 70,23           | 1.654.836                    | 28.023.034            |
| Kabupaten Brebes        | 2019  | 293,2                     | 1.665.850                   | 66,12           | 1.809.096                    | 32.847.863            |
| Kabupaten Brebes        | 2020  | 308,78                    | 1.807.614                   | 66,11           | 1.978.759                    | 32.693.081            |
| Kabupaten Brebes        | 2021  | 314,95                    | 1.866.723                   | 66,32           | 1.992.685                    | 33.533.328            |
| Kabupaten Brebes        | 2022  | 290,66                    | 1.885.019                   | 67,03           | 2.010.617                    | 35.414.209            |
| Kabupaten Brebes        | 2023  | 286,14                    | 2.018.837                   | 67,95           | 2.043.077                    | 36.739.154            |
| Kota Magelang           | 2019  | 9,1                       | 1.707.000                   | 78,8            | 122.111                      | 6.470.540             |
| Kota Magelang           | 2020  | 9,27                      | 1.853.000                   | 78,99           | 121.526                      | 6.312.054             |
| Kota Magelang           | 2021  | 9,44                      | 1.914.000                   | 79,43           | 121.610                      | 6.513.895             |
| Kota Magelang           | 2022  | 8,65                      | 1.935.913                   | 80,39           | 121.675                      | 6.889.453             |
| Kota Magelang           | 2023  | 7,45                      | 2.066.007                   | 81,17           | 122.150                      | 7.264.924             |
| Kota Surakarta          | 2019  | 45,2                      | 1.802.700                   | 81,86           | 519.587                      | 35.441.108            |
| Kota Surakarta          | 2020  | 47,03                     | 1.956.200                   | 82,21           | 522.364                      | 34.815.965            |
| Kota Surakarta          | 2021  | 48,78                     | 2.013.810                   | 82,62           | 522.728                      | 36.211.248            |
| Kota Surakarta          | 2022  | 45,94                     | 2.035.720                   | 83,08           | 523.008                      | 38.475.988            |

| Kab/Kota        | Tahun | Kemiskinan<br>(ribu jiwa) | Upah<br>Minimum<br>(rupiah) | IPM<br>(persen) | Jumlah<br>Penduduk<br>(jiwa) | PDRB<br>(juta rupiah) |
|-----------------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Kota Surakarta  | 2023  | 43,89                     | 2.174.169                   | 83,54           | 526.870                      | 40.620.314            |
| Kota Salatiga   | 2019  | 9,2                       | 1.875.325                   | 83,12           | 194.084                      | 9.666.446             |
| Kota Salatiga   | 2020  | 9,69                      | 2.034.915                   | 83,14           | 192.322                      | 9.503.711             |
| Kota Salatiga   | 2021  | 10,14                     | 2.101.457                   | 83,6            | 193.525                      | 9.821.996             |
| Kota Salatiga   | 2022  | 9,45                      | 2.128.523                   | 84,35           | 195.065                      | 10.365.438            |
| Kota Salatiga   | 2023  | 9,41                      | 2.284.180                   | 84,99           | 198.920                      | 10.918.689            |
| Kota Semarang   | 2019  | 72                        | 2.498.588                   | 83,19           | 1.814.110                    | 140.199.517           |
| Kota Semarang   | 2020  | 79,58                     | 2.715.000                   | 83,05           | 1.653.524                    | 137.601.980           |
| Kota Semarang   | 2021  | 84,45                     | 2.810.025                   | 83,55           | 1.656.564                    | 144.704.572           |
| Kota Semarang   | 2022  | 79,87                     | 2.835.021                   | 84,08           | 1.659.975                    | 152.995.412           |
| Kota Semarang   | 2023  | 80,53                     | 3.060.349                   | 84,43           | 1.694.743                    | 161.849.112           |
| Kota Pekalongan | 2019  | 20,2                      | 1.906.922                   | 74,77           | 307.097                      | 7.477.425             |
| Kota Pekalongan | 2020  | 22,16                     | 2.072.000                   | 74,98           | 307.150                      | 7.337.834             |
| Kota Pekalongan | 2021  | 23,49                     | 2.139.754                   | 75,4            | 308.310                      | 7.601.486             |
| Kota Pekalongan | 2022  | 21,81                     | 2.156.213                   | 75,9            | 309.742                      | 8.039.460             |
| Kota Pekalongan | 2023  | 21,36                     | 2.305.823                   | 76,71           | 317.524                      | 8.476.546             |
| Kota Tegal      | 2019  | 18,6                      | 1.762.000                   | 74,93           | 249.905                      | 11.205.783            |
| Kota Tegal      | 2020  | 19,55                     | 1.925.000                   | 75,07           | 273.825                      | 10.949.122            |
| Kota Tegal      | 2021  | 20,27                     | 1.982.750                   | 75,52           | 275.781                      | 11.290.269            |
| Kota Tegal      | 2022  | 19,78                     | 2.005.930                   | 76,15           | 278.299                      | 11.873.201            |
| Kota Tegal      | 2023  | 19,22                     | 2.145.012                   | 77,02           | 282.781                      | 12.468.606            |

## Lampiran 2. Analisis Statistik Deskriptif

|              | KEMISKINAN | UPAH_MINIMUM | IPM      | JUMLAH_PENDUDUK | PDRB     |
|--------------|------------|--------------|----------|-----------------|----------|
| Mean         | 111.1825   | 2019597.     | 73.08383 | 1043143.        | 29152725 |
| Median       | 99.61000   | 1986450.     | 71.99000 | 1017767.        | 21425793 |
| Maximum      | 314.9500   | 3060349.     | 84.99000 | 2043077.        | 1.62E+08 |
| Minimum      | 7.450000   | 1610000.     | 66.11000 | 121526.0        | 6312054. |
| Std. Dev.    | 62.27001   | 237004.5     | 4.429237 | 451074.2        | 26537643 |
| Skewness     | 0.749605   | 1.308543     | 0.910148 | 0.029327        | 3.100625 |
| Kurtosis     | 3.879578   | 5.721146     | 3.319295 | 2.851263        | 13.27940 |
|              |            |              |          |                 |          |
| Jarque-Bera  | 22.03024   | 103.9338     | 24.90416 | 0.186398        | 1050.887 |
| Probability  | 0.000016   | 0.000000     | 0.000004 | 0.911012        | 0.000000 |
|              |            |              |          |                 |          |
| Sum          | 19456.94   | 3.53E+08     | 12789.67 | 1.83E+08        | 5.10E+09 |
| Sum Sq. Dev. | 674694.4   | 9.77E+12     | 3413.556 | 3.54E+13        | 1.23E+17 |

|              |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|              |     |     |     |     |     |
| Observations | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

### Lampiran 3. Hasil Regresi Model *Fixed Effect* 1

Dependent Variable: KEMISKINAN  
Method: Panel Least Squares  
Date: 07/02/25 Time: 00:29  
Sample: 2019 2023  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 35  
Total panel (balanced) observations: 175

| Variable                              | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C                                     | 685.9433    | 54.62807              | 12.55661    | 0.0000 |
| UPAH_MINIMUM                          | 5.15E-05    | 4.95E-06              | 10.42072    | 0.0000 |
| IPM                                   | -9.216686   | 0.869434              | -10.60079   | 0.0000 |
| JUMLAH_PENDUDUK                       | 5.89E-06    | 8.67E-06              | 0.679189    | 0.4982 |
| PDRB                                  | -3.92E-07   | 1.75E-07              | -2.239704   | 0.0267 |
| Effects Specification                 |             |                       |             |        |
| Cross-section fixed (dummy variables) |             |                       |             |        |
| R-squared                             | 0.997305    | Mean dependent var    | 111.1825    |        |
| Adjusted R-squared                    | 0.996552    | S.D. dependent var    | 62.27001    |        |
| S.E. of regression                    | 3.656606    | Akaike info criterion | 5.624531    |        |
| Sum squared resid                     | 1818.424    | Schwarz criterion     | 6.329826    |        |
| Log likelihood                        | -453.1465   | Hannan-Quinn criter.  | 5.910619    |        |
| F-statistic                           | 1324.327    | Durbin-Watson stat    | 1.725026    |        |
| Prob(F-statistic)                     | 0.000000    |                       |             |        |

### Lampiran 4. Hasil Uji Chow 2

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: FIX  
Test cross-section fixed effects

| Effects Test             | Statistic  | d.f.     | Prob.  |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F          | 243.838946 | (34,136) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 722.134834 | 34       | 0.0000 |

### Lampiran 5. Hasil Uji Hausman 3

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|--------------|-------------------|--------------|-------|
|--------------|-------------------|--------------|-------|

*Lampiran 6. Hasil Cross Section Effect*

| No. | KAB/KOTA               | Effect     | Intercept | Intercept + effect |
|-----|------------------------|------------|-----------|--------------------|
| 1   | Kabupaten Cilacap      | 7.158.765  | 6.859.433 | 14.018.198         |
| 2   | Kabupaten Banyumas     | 1.110.101  | 6.859.433 | 7.969.534          |
| 3   | Kabupaten Purbalingga  | -510.444   | 6.859.433 | 6.348.989          |
| 4   | Kabupaten Banjarnegara | -8.089.445 | 6.859.433 | -1.230.012         |
| 5   | Kabupaten Kebumen      | 6.935.815  | 6.859.433 | 13.795.248         |
| 6   | Kabupaten Purworejo    | -2.331.412 | 6.859.433 | 4.528.021          |
| 7   | Kabupaten Wonosobo     | -1.872.569 | 6.859.433 | 4.986.864          |
| 8   | Kabupaten Magelang     | 4.300.897  | 6.859.433 | 11.160.330         |
| 9   | Kabupaten Boyolali     | 1.169.559  | 6.859.433 | 8.028.992          |
| 10  | Kabupaten Klaten       | 6.776.416  | 6.859.433 | 13.635.849         |
| 11  | Kabupaten Sukoharjo    | 1.388.711  | 6.859.433 | 8.248.144          |
| 12  | Kabupaten Wonogiri     | -2.051.307 | 6.859.433 | 4.808.126          |
| 13  | Kabupaten Karanganyar  | 8.042.687  | 6.859.433 | 14.902.120         |
| 14  | Kabupaten Sragen       | 2.664.912  | 6.859.433 | 9.524.345          |
| 15  | Kabupaten Grobogan     | 3.447.324  | 6.859.433 | 10.306.757         |
| 16  | Kabupaten Blora        | -3.841.902 | 6.859.433 | 3.017.531          |
| 17  | Kabupaten Rembang      | -3.091.435 | 6.859.433 | 3.767.998          |
| 18  | Kabupaten Pati         | 9.083.875  | 6.859.433 | 15.943.308         |
| 19  | Kabupaten Kudus        | -1.895.484 | 6.859.433 | 4.963.949          |
| 20  | Kabupaten Jepara       | -3.288.889 | 6.859.433 | 3.570.544          |
| 21  | Kabupaten Demak        | 2.519.832  | 6.859.433 | 9.379.265          |
| 22  | Kabupaten Semarang     | -3.002.286 | 6.859.433 | 3.857.147          |
| 23  | Kabupaten Temanggung   | -5.819.043 | 6.859.433 | 1.040.390          |
| 24  | Kabupaten Kendal       | -3.266.097 | 6.859.433 | 3.593.336          |
| 25  | Kabupaten Batang       | -8.569.263 | 6.859.433 | -1.709.830         |
| 26  | Kabupaten Pekalongan   | -5.308.297 | 6.859.433 | 1.551.136          |
| 27  | Kabupaten Pemalang     | 3.442.211  | 6.859.433 | 10.301.644         |
| 28  | Kabupaten Tegal        | -3.468.799 | 6.859.433 | 3.390.634          |
| 29  | Kabupaten Brebes       | 1.341.418  | 6.859.433 | 8.200.851          |
| 30  | Kota Magelang          | -3.786.797 | 6.859.433 | 3.072.636          |
| 31  | Kota Surakarta         | 3.063.613  | 6.859.433 | 9.923.046          |
| 32  | Kota Salatiga          | -8.321.023 | 6.859.433 | -1.461.590         |
| 33  | Kota Semarang          | 6.870.141  | 6.859.433 | 13.729.574         |

| No. | KAB/KOTA        | Effect     | Intercept | Intercept +<br>effect |
|-----|-----------------|------------|-----------|-----------------------|
| 34  | Kota Pekalongan | -7.566.158 | 6.859.433 | -706.725              |
| 35  | Kota Tegal      | -6.673.118 | 6.859.433 | 186.315               |